

EFEKTIVITAS KOMITE AUDIT TERHADAP KETEPATAN WAKTU PELAPORAN KEUANGAN

(Studi Empiris pada Perusahaan Publik yang Terindikasi Kesulitan Keuangan
Tahun 2010-2012)



SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat
untuk menyelesaikan Program Sarjana (S1)
pada Program Sarjana Fakultas Ekonomika dan Bisnis
Universitas Diponegoro

Disusun oleh :

Firdaus Nikmatullah Akbar
NIM. C2C009197

FAKULTAS EKONOMIKA DAN BISNIS
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG
2014

PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama Penyusun : Firdaus Nikmatullah Akbar
Nomor Induk Mahasiswa : C2C009197
Fakultas/Jurusan : Ekonomika dan Bisnis / Akuntansi
Judul Skripsi : **EFEKTIVITAS KOMITE AUDIT TERHADAP KETEPATAN WAKTU PELAPORAN KEUANGAN** (Studi Empiris pada Perusahaan Publik yang Terindikasi Kesulitan Keuangan Tahun 2010-2012)
Dosen Pembimbing : Dr. Endang Kiswara, M.Si., Akt

Semarang, 09 feb 2014

Dosen Pembimbing,

Dr. Endang Kiswara, M.Si., Akt
NIP. 196902141994122001

PENGESAHAN KELULUSAN UJIAN

Nama Penyusun : Firdaus Nikmatullah Akbar
Nomor Induk Mahasiswa : C2C009197
Fakultas/Jurusan : Ekonomika dan Bisnis/AKUNTANSI
Judul Skripsi : **Efektivitas Komite Audit Terhadap Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan** (Studi Empiris pada Perusahaan Publik yang Terindikasi Kesulitan Keuangan Tahun 2010-2012)

Dosen Pembimbing : Dr. Endang Kiswara, M.Si., Akt

Telah dinyatakan lulus ujian pada tanggal : 28 Februari 2014

Tim Penguji:

1. Dr. Endang Kiswara, M.Si., Akt (.....)
2. Dr. Basuki Hadiprajitno, MBA, M.Acc., Akt (.....)
3. Adityawarman, S.E., M.Acc., Akt (.....)

PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertandatangan di bawah ini saya, Firdaus Nikmatullah Akbar, menyatakan bahwa skripsi dengan judul : EFEKTIVITAS KOMITE AUDIT TERHADAP KETEPATAN WAKTU PELAPORAN KEUANGAN (Studi Empiris pada Perusahaan Publik yang Terindikasi Kesulitan Keuangan Tahun 2010-2012), adalah hasil tulisan saya sendiri. Dengan ini saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi ini tidak terdapat keseluruhan atau sebagian tulisan orang lain yang saya ambil dengan cara menyalin atau meniru dalam bentuk rangkaian kalimat atau simbol yang menunjukkan gagasan atau pemikiran dari penulis lain, yang saya akui seolah-olah sebagai tulisan saya sendiri, dan atau tidak terdapat bagian atau keseluruhan tulisan yang saya salin itu, atau saya ambil dari tulisan orang lain tanpa memberikan pengakuan penulis aslinya.

Apabila saya melakukan tindakan yang bertentangan dengan hal tersebut di atas, baik disengaja maupun tidak, dengan ini saya menyatakan menarik skripsi yang saya ajukan sebagai hasil tulisan saya sendiri. Bila kemudian terbukti bahwa saya melakukan tindakan menyalin atau meniru tulisan orang lain seolah-olah hasil pemikiran saya sendiri, berarti gelar ijazah yang telah diberikan oleh universitas batal saya terima.

Semarang, 11 Juni 2013

Yang membuat pernyataan

Firdaus Nikmatullah Akbar

NIM : C2C009197

MOTO DAN PERSEMBAHAN

”Hanya kepada Engkaulah kami menyembah dan hanya kepada Engkaulah kami mohon pertolongan.” (Q.S Al Fatihah: 5)

“Riches are not from abundance of worldly goods, but from a contented mind.” Nabi Muhammad SAW

“Insanity, doing the same thing over and over again and expecting different results.” Albert Einstein

Skripsi ini kupersembahkan untuk :

- ♥ *Papa dan Mama tercinta yang jasanya tiada tara*
- ♥ *Mas Rully, Mas Indra, Mba farah, Mba Aan yang selalu memberikan masukan dan semangat*
- ♥ *Teman- teman semuanya yang telah memberikan berbagai kesan istimewa*

ABSTRACT

This study aims to analyze the impact of audit committee effectiveness on timeliness of financial reporting that indicates financial distress. This research is a replication of the study Ika dan Ghazali (2012) who examines about the audit committee effectiveness and timeliness of reporting. Audit committee effectiveness is proxied by DeZoort index there are audit committee expertise, audit committee charter, audit committee size, and audit committee meeting. This study also includes five variable, including ROA, leverage, firm size, accountant public size, and industry type as control variables.

The population of this research is the non financial industry companies are listed on the Indonesia Stock Exchange (IDX) 2010-2012 with 76 total samples of non financial companies. Financial distress criteria in this study are measured by cumulative negative earnings over any two years period. Sampling technique used in this research is random sampling method and the data analysis techniques use multiple linear regression method with SPSS.

The result of this study showed that audit committee effectiveness has positive impact on timeliness of financial reporting that indicated financial distress. Audit committee expertise and two control variables are firm size and industry type which has significant and positive impact on the financial reporting that indicated financial distress. Although other variables does not have significant effect on timeliness of financial reporting that indicated financial distress.

Keywords: *audit committee effectiveness, timeliness of financial reporting, financial distress*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh efektivitas komite audit terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan perusahaan yang terindikasi kesulitan keuangan. Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian Ika dan Ghazali (2012) yang meneliti tentang efektivitas komite audit dan ketepatan waktu pelaporan keuangan. Efektivitas komite audit diproksikan oleh index DeZoort yaitu keahlian komite audit, piagam komite audit, ukuran komite audit, dan pertemuan komite. Penelitian ini juga menyertakan lima variabel yaitu ROA, pengungkitan, ukuran perusahaan, ukuran KAP, dan jenis industri sebagai variabel kontrol.

Populasi dari penelitian ini adalah perusahaan sektor non keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2010-2012 dengan 76 total sampel penelitian perusahaan non keuangan. Kriteria kesulitan keuangan dalam penelitian ini diukur dengan menggunakan metode laba negatif dua tahun berturut-turut. Teknik sampel dalam penelitian ini menggunakan metode sampel acak dan teknik analisis data dilakukan dengan pengujian hipotesis menggunakan metode regresi logistik dengan bantuan SPSS.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa efektivitas komite audit berpengaruh positif terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan perusahaan yang terindikasi kesulitan keuangan. keahlian komite audit dan dua variabel kontrol yaitu ukuran perusahaan dan jenis industri berpengaruh positif dan signifikan terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan perusahaan yang terindikasi kesulitan keuangan. Sedangkan variabel lainnya tidak berpengaruh secara signifikan.

Kata Kunci : efektivitas komite audit, ketepatan waktu pelaporan keuangan, kesulitan keuangan

KATA PENGANTAR

Puji sukur dipanjatkan atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmatNya, sehingga dapat diselesaikannya skripsi yang berjudul **“Efektivitas Komite Audit terhadap Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan** (studi empiris pada perusahaan publik yang terindikasi kesulitan keuangan tahun 2010-2012)”. Penyusunan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi salah satu persyaratan guna memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Dipenegoro.

Pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih pada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi kepada :

1. Papa dan Mama tercinta, yang selalu memberikan dukungan, perhatian, doa, semangat, dan kasih sayang yang tiada hentinya. Terima kasih.
2. Dosen pembimbing (Dr. Endang Kiswara, M.Si., Akt), yang dengan sabar membimbing, memberikan arahan, dalam menyelesaikan skripsi ini.
3. Dosen-dosen dan Staf FEB UNDIP yang telah memberikan banyak pengetahuan dan wawasan selama studi.
4. Keluarga tersayang, Mas Rully, Mas Indra, Mba Farah, Mba Aan, Andru, Mba Vita.
5. Teman-teman yang selalu memberikan dukungan dan kesan Rahmat (monmon), JoJo (rooney), Bonang (bubum), Adit (sensei), bang Riza (ijah), angga (anggend), ikang (muslim), haris (orlam), Alfian (Priuk), Rony, Barqy (tupac), Idel (anakkonda), Rio (oy), Cuki, Ican (setsetset), Fabri (complicated), Johaness (angker), Nobon (patkai), Diki (buaya), Abah, Alfred (croc), Erdi (monkey), Desti (xxx), Arun (boly), Rey (kece), Ayub, billy (begins), Dara (bonding), Budi (engkong), Decky, Gito (gitoyatoya), Iqbal (bewok), Aga, Desta, Rida (D.Emon), Prita, Dian (kriting), almas, Karin (tikus), riske (aitakata), Rima (breke), Adimas, Agnes, Reka, Haris, Marcel, Oka, Rony, Aris, Mas Ud, Mas Agus, Prita Saras, Sasa, Meike (ncun), Laras (bundos), Devi (depong), Roby, Fafan, dan masih banyak lagi yang belum tertulis namun pasti selalu dikenang dalam hidup ini.

6. Ibu Koko beserta keluarga yang telah banyak membantu saya selama tinggal di Semarang. Terima kasih atas arahan dan dukungannya selama ini.
7. Teman-teman Akuntansi Reguler 2 Kelas A yang tidak dapat disebutkan satu persatu, terimakasih atas kebersamaannya selama ini.
8. Tim Futsal Akuntansi 2009 : Alfian, Jojo, Anggeng, Deny, Ocir, Rino, Hemi, Adi, Agha yang mengajarkan tentang bagaimana kebersamaan, kerja keras, dan doa selalu berhasil. “Pantang pulang sebelum final”
9. Semoga nama-nama diatas dan yang belum sempat disebutkan mendapatkan kebahagiaan dan berkah dari Allah SWT akhirat-dunia. Amin.

Penulis mohon maaf apabila dalam skripsi ini masih jauh dari sempurna karena keterbatasan ilmu, pengetahuan, dan pengalaman penulis. Oleh karena itu, penulis mengharapkan saran dan kritik membangun guna perbaikan tulisan di masa yang akan datang. Semoga skripsi ini berguna bagi pihak-pihak yang berkompentingan, terutama di bidang akuntansi.

Semarang, Januari 2013

Penulis,

Firdaus Nikmatullah Akbar
C2C009197

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
PERNYATAAN ORISINALITAS SKRISI.....	iv
<i>ABSTRACT</i>	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Masalah.....	1
1.2. Rumusan Masalah	5
1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	6
1.4. Sistematika Penulisan	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	9
2.1. Landasan Teori	9
2.1.1. Teori Keagenan	9
2.1.2. Agency Cost	12
2.1.3. Komite Audit.....	18
2.1.4. Struktur Komite Audit	14
2.1.5. Efektivitas Komite Audit	16
2.1.5.1. Komponen Index Efektivitas Komite Audit	17
2.1.5.2. Keahlian Komite Audit.....	18
2.1.5.3. Piagam Komite Audit	19
2.1.5.4. Ukuran Komite Audit	20
2.1.5.5. Pertemuan Komite Audit	20
2.1.6 Laporan Keuangan.....	21
2.1.7 Pengertian Good Corporate Governance	23
2.1.8 Bapepam.....	25
2.1.9 Ketepatan Waktu Pelaporan	28
2.1.10 <i>Financial Distress</i>	31

2.2. Penelitian Terdahulu	34
2.3. Kerangka Pemikiran Teoritis.....	38
2.4. Pengembangan Hipotesis	31
BAB III METODE PENELITIAN.....	34
3.1. Variabel Penelitian dan Definisi Operasional.....	44
3.1.1. Definisi Operasional variabel.....	45
3.1.2. Variabel Independen	47
3.1.2.1. Keahlian Komite Audit.....	47
3.1.2.2. Piagam Komite Audit.....	47
3.1.2.3. Ukuran Komite Audit	48
3.1.2.4. Pertemuan Komite Audit	48
3.1.3. Variabel Kontrol.....	48
3.1.3.1. ROA.....	49
3.1.3.2. Leverage	49
3.1.3.3. Ukuran Perusahaan.....	49
3.1.3.4. Ukuran KAP	50
3.1.3.5. Jenis Industri	50
3.2. Populasi dan Sampel	50
3.3. Jenis dan Sumber Data	51
3.4. Metode Pengumpulan Data	51
3.5. Metode analisis	51
3.5.1. Statistik Deskriptif.....	52
3.5.2. Regresi Logistik	42
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	56
4.1. Deskripsi Objek Penelitian	56
4.2. Analisis Data	63
4.2.1. Uji Kesesuaian Model	63
4.2.2 Uji Keseluruhan Model	65
4.2.3 Koefisien Determinasi	66
4.2.4 Pengujian Hipotesis.....	67
4.3 Penjelasan	72
BAB V PENUTUP	79
5.1. Kesimpulan.....	79
5.2. Keterbatasan	80

5.3. Implikasi Penelitian	80
5.4. Saran Penelitian Mendatang.....	81
DAFTAR PUSTAKA	82

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu	36
Tabel 3.1 Definisi Operasional Variabel	45
Tabel 4.1 Distribusi Sampel	55
Tabel 4.2 Ketepatan Waktu	57
Tabel 4.3 Statistik Deskriptif 1	58
Tabel 4.4 Statistik Deskriptif 2	60
Tabel 4.5 Statistik Deskriptif 3	61
Tabel 4.6 Statistik Deskriptif 4	62
Tabel 4.7 Hasil Uji Kesesuaian Model	64
Tabel 4.8 Tabel Klasifikasi.....	64
Tabel 4.9 Hasil Uji Keseluruhan Model.....	66
Tabel 4.10 Hasil Koefisien Determinasi	67
Tabel 4.11 Hasil Uji Regresi Logistik.....	68

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran.....	38
------------------------------------	----

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran A Daftar Sampel Perusahaan	88
Lampiran B Hasil Output SPSS 1.6	90

BAB I

PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai latar belakang penelitian dalam menganalisis efektivitas komite audit terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan. Selain itu dijelaskan pula rumusan masalah, tujuan, dan manfaat penelitian, serta sistematika penulisan. Selengkapnya dapat dilihat pada uraian berikut.

1.1 Latar Belakang Masalah

Hingga saat ini tidak sedikit perusahaan yang terlambat dalam menyampaikan laporan keuangannya. Data dari Bursa Efek Indonesia menyatakan bahwa 52 emiten hingga 1 April 2013 belum menyampaikan laporan keuangan auditan yang berakhir 31 Desember 2012, tahun 2012 tercatat 54 emiten terlambat dalam menyampaikan laporan keuangan auditan, sedangkan tahun 2011 tercatat 62 emiten terlambat dalam menyampaikan laporan keuangan auditan 2010.

Padahal pelaporan keuangan yang tepat waktu merupakan hal yang penting bagi investor karena akan mengurangi ketidakpastian dalam mengambil keputusan ekonomi dan penyebaran informasi keuangan yang tidak merata diantara para stakeholder (Ashton, dkk 1989 ; Jaggi dan Tsui, 1999) sehingga dapat merugikan berbagai pihak tidak terkecuali perusahaan tersebut. *International Accounting Standards Board* (IASB) dalam (Martani, dkk 2012) menjelaskan bahwa laporan keuangan yang disajikan terlambat akan menyebabkan informasi tersebut kehilangan relevansinya dalam mempengaruhi keputusan ekonomi pemakai, dimana informasi tersebut berfungsi sebagai peramalan (*predictive*) dan penegasan (*confirmatory*). Bapepam juga menyatakan bahwa semua perusahaan yang terdaftar dalam pasar modal wajib menyampaikan

laporan keuangan kepada masyarakat secara berkala sebagai wujud pertanggungjawaban dan transparansi. Disamping itu perusahaan wajib menyampaikan laporan keuangan sebelum 90 hari sejak berakhirnya tahun buku perusahaan dan apabila melewati hari tersebut maka akan dikenakan sanksi oleh Bapepam.

Ketepatan waktu pelaporan keuangan merupakan salah satu syarat dari kualitas laporan keuangan dan dipengaruhi oleh berbagai variabel yang secara umum dibagi dalam 2 kategori yaitu faktor audit terkait (*audit related*) dan spesifik perusahaan (*company specific*), faktor spesifik perusahaan yaitu faktor yang memungkinkan manajemen untuk menyiapkan laporan keuangan dengan tepat waktu dan memangkas biaya yang berhubungan pada keterlambatan yang tidak penting (Ika dan Ghazali, 2012), faktor spesifik perusahaan tentunya tidak lepas dari tata kelola perusahaan dimana tata kelola yang baik dibutuhkan untuk menjamin kualitas laporan keuangannya. Dalam *Forum Corporate Governance in Indonesia* (2002) menjelaskan tata kelola perusahaan (*Corporate governance*) adalah seperangkat aturan yang mengatur hubungan antara pemegang saham dan pengelola perusahaan, dengan kata lain sistem yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan agar dapat mencapai misi, visi, dan strategi yang ditetapkan, karena dengan tata kelola yang baik maka perusahaan akan mempunyai kinerja yang baik.

Dalam rangka menjalankan tata kelola perusahaan, komite audit didirikan sebagai bentuk pengawasan dan pengendalian terhadap kinerja pengelola, sebagai bentuk perwujudan tata kelola (*corporate governance*) yang baik dan bertanggung jawab kepada dewan komisaris untuk memberikan masukan dan evaluasi terhadap pengelolaan perusahaan. Dalam surat edaran Bapepam No. SE/03/PM/2000 menyatakan bahwa komite audit bertugas untuk membantu dewan komisaris dengan memberikan pendapat profesional yang independen, untuk meningkatkan kualitas kinerja serta mengurangi penyimpangan pengelolaan perusahaan. Awal mulanya komite

audit jika ditelusuri berangkat dari teori agensi. Dimana Jensen dan Meckling (1976) menyatakan bahwa dalam teori agensi terdapat konflik keagenan karena adanya perbedaan kepentingan antara pemilik (*principal*) dan pengelola (*agent*), yang dapat menyebabkan permasalahan bagi perusahaan untuk mencapai tujuannya. Disamping itu terdapat masalah agensi yang dapat menyebabkan berbagai dampak buruk yang salah satunya adalah informasi asimetris yaitu perbedaan informasi antara pemilik (*principal*) dan pengelola dimana pengelola (*agent*) memiliki informasi mengenai kondisi perusahaan yang lebih dibandingkan pemilik. Maka berangkat dari teori tersebut didirikanlah komite audit yang diharapkan dapat menjembatani perbedaan kepentingan tersebut.

Dalam mengemban tugasnya, komite audit diharapkan dapat berfungsi dengan maksimal dalam mengawasi dan meningkatkan kinerja perusahaan, oleh karena itu komite audit harus memperhatikan berbagai kriteria agar dapat efektif dalam menjalankan perannya, Wathne (2000) menyatakan bahwa komite audit yang efektif diharapkan fokus pada optimalisasi kekayaan pemegang saham dan mencegah maksimalisasi kepentingan pribadi oleh manajemen puncak. Oleh karena itu, efektivitas pada komite audit harus diperhatikan agar dapat mewujudkan *good corporate governance (GCG)* melalui fungsi pengawasan yang dilaksanakan secara konsisten dan memadai, terutama dalam mengawasi kualitas dan integritas laporan keuangan perusahaan khususnya pada ketepatan waktu pelaporan keuangan. Hal ini penting karena informasi akuntansi akan berfungsi dengan baik jika informasi disampaikan pada waktu yang semestinya, agar mampu memberikan pengaruh dalam pengambilan keputusan (Martani, dkk 2012).

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian Ika dan Ghazali (2012) yang menguji pengaruh dari efektivitas komite audit terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Perbedaan penelitian ini terhadap penelitian

sebelumnya yaitu, pada penelitian terdahulu dimana menguji efektivitas komite audit dalam kaitannya terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan pada perusahaan yang normal, sedangkan dalam penelitian ini menguji hubungan tersebut pada perusahaan yang terindikasi kesulitan keuangan (*financial distress*). Hal ini menarik karena berdasarkan pengamatan terdapat beberapa penelitian yang menguji pengaruh tersebut pada perusahaan yang normal, dan hasilnya sebagian besar konsisten dengan penelitian yang lain (Purwati, 2006 ; Ika dan Ghazali, 2012 ; Yaputro dan Rudiawarni, 2012). Namun jarang sekali yang menguji hubungan ini dengan mengaitkan pada perusahaan yang terindikasi kesulitan keuangan (*financial distress*).

Dalam penelitian ini kesulitan keuangan (*financial distress*) dikriteriakan sebagai perusahaan yang selama 2 tahun berturut-turut mengalami laba bersih negatif. Perbedaan selanjutnya dalam penelitian ini adalah menguji elemen index DeZoort satu per satu, yaitu keahlian komite audit, piagam komite audit, ukuran komite audit, dan pertemuan komite audit. Hal ini dianggap penting agar pengaruh dalam komponen tersebut dapat diuji secara individu. Penelitian ini juga menambahkan variabel kontrol berupa ROA dan *leverage* agar variabel dependen dapat dipengaruhi lebih baik dalam kaitannya pada variabel independen.

Sampel perusahaan dalam penelitian ini yaitu semua jenis perusahaan kecuali pada sektor keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) dimana mengacu pada penelitian Ika dan Ghazali (2012), hal ini disebabkan karena pada perusahaan yang bergerak dibidang keuangan memiliki struktur keuangan yang berbeda dengan sektor non keuangan dan sebagian besar masih dikendalikan oleh pemerintah.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan diatas disimpulkan bahwa salah satu peran penting komite audit yaitu meningkatkan kualitas dan integritas laporan keuangan, dimana ketepatan waktu pelaporan keuangan merupakan elemen yang penting dalam menjaga suatu integritas pelaporan keuangan yang merupakan variabel kualitatif dalam prinsip laporan keuangan (Martini, dkk 2012),berbagai penelitian pada umumnya menunjukkan bahwa komite audit mempunyai pengaruh yang signifikan atas ketepatan waktu pelaporan keuangan terhadap perusahaan (Purwati, 2006 ; Ika dan Ghazali, 2012 ; Yaputro dan Rudiawarni), namun sampai saat ini masih jarang yang meneliti apakah efektivitas komite audit mempunyai pengaruh dalam meningkatkan ketepatan waktu pelaporan keuangan perusahaan yang terindikasi kesulitan keuangan, jadi berdasarkan penjelasan tersebut dapat disimpulkan dalam bentuk pertanyaan yaitu :

1. Apakah keahlian komite audit mempengaruhi ketepatan waktu pelaporan keuangan perusahaan yang mengalami kesulitan keuangan?
2. Apakah piagam komite audit mempengaruhi ketepatan waktu pelaporan keuangan perusahaan yang mengalami kesulitan keuangan?
3. Apakah ukuran komite audit mempengaruhi ketepatan waktu pelaporan keuangan perusahaan yang mengalami kesulitan keuangan?
4. Apakah pertemuan komite audit mempengaruhi ketepatan waktu pelaporan keuangan perusahaan yang mengalami kesulitan keuangan?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan antara efektivitas komite audit yaitu keahlian komite audit, piagam komite audit, ukuran komite audit, dan pertemuan komite audit dengan ketepatan waktu pelaporan keuangan perusahaan yang terindikasi kesulitan keuangan.
2. Memberikan bukti deskriptif sejauh mana efektivitas komite audit terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan pada perusahaan yang terindikasi kesulitan keuangan.

Manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi Perusahaan yang *go public*

Membantu perusahaan *go public* untuk meningkatkan ketepatan waktu pelaporan keuangan dengan menganalisis faktor-faktor dominan dalam elemen efektivitas komite audit.

2. Bagi Penelitian Mendatang

Penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi penelitian mendatang dalam menganalisis peran elemen-elemen efektivitas komite audit terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan.

1.4 Sistematika Penulisan

Penelitian ini disusun dengan sistematika secara berurutan. Penelitian ini terdiri dari beberapa bab, yaitu: Bab I Pendahuluan, Bab II Tinjauan Pustaka, Bab III Metode Penelitian, Bab IV Hasil Analisis dan Pembahasan, Bab V Penutup. Selanjutnya, deskripsi masing-masing bab akan dijelaskan sebagai berikut.

BAB I : PENDAHULUAN

Latar belakang masalah berisi tentang permasalahan penelitian dan mengapa masalah tersebut penting dan perlu untuk diteliti, rumusan masalah merupakan pernyataan tentang fenomena dan konsep yang memerlukan pemecahan dan memerlukan jawaban melalui suatu penelitian, tujuan dan kegunaan penelitian merupakan pernyataan mengenai hasil yang ingin dicapai melalui proses penelitian, dan sistematika penulisan yaitu berisi uraian ringkas dari materi yang dibahas pada setiap bab.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Landasan teori dan penelitian terdahulu, dalam subbab ini dijabarkan teori-teori yang mendukung perumusan hipotesis serta sangat membantu dalam analisis hasil penelitian nantinya, kerangka pemikiran dijelaskan secara singkat tentang permasalahan yang akan diteliti yaitu tentang apa yang seharusnya terjadi dan apa yang senyatanya, hipotesis berisi pernyataan singkat yang disimpulkan dari tinjauan pustaka

BAB III: METODE PENELITIAN

Variabel penelitian dan definisi operasional variabel, berisi deskripsi tentang variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian yang selanjutnya didefinisikan dalam definisi operasional. Populasi dan sampel yang digunakan dalam penelitian. Deskripsi tentang jenis data dari variabel penelitian, baik berupa data primer maupun data sekunder. Metode pengumpulan data dan metode analisis data yang digunakan.

BAB IV : HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Deskripsi objek penelitian berupa deskripsi variabel dalam penelitian, deskripsi umum wilayah penelitian, dan deskripsi umum sampel penelitian. Analisis data menitikberatkan pada hasil olahan data sesuai dengan alat dan teknik analisis yang digunakan. Interpretasi hasil berisi interpretasi terhadap hasil analisis dan juga argumentasi yang mendukung dari hasil.

BAB V : PENUTUP

Kesimpulan, keterbatasan, implikasi dan saran yang mencakup penyajian secara singkat apa yang telah diperoleh dari pembahasan, kemudian menguraikan kesimpulan yang ditemukan setelah dilakukan analisis dan interpretasi hasil, dan kemudian menyampaikan masukan kepada pihak yang berkepentingan terhadap penelitian.

Bab II

Tinjauan Pustaka

2.1 Landasan Teori

Pada bagian ini akan dijelaskan pengertian-pengertian yang mendukung dalam perumusan hipotesis penelitian ini, yang digunakan sebagai dasar dalam menganalisis hasil penelitian yang diperoleh. Berikut ini landasan teori yang berkaitan dengan penelitian ini.

2.1.1 Teori Keagenan

Teori keagenan adalah hubungan kontrak kerja (*nexus of contract*) antara *principal* dengan *agent* dimana *principal* adalah pemilik atau pemegang saham, sedangkan *agent* adalah manajer atau pihak yang mengelola perusahaan. *Principal* menyediakan sumber daya perusahaan yang diperlukan untuk kegiatan operasi perusahaan sedangkan manajemen berfungsi untuk mengelola sumber daya perusahaan untuk memaksimalkan kesejahteraan perusahaan dan pemegang kepentingan. Konflik keagenan terjadi karena adanya perbedaan kepentingan dan resiko antara *principal* dan *agent*. *Principal* mempunyai keinginan untuk memaksimalkan *return* atau deviden, sedangkan *agent* mempunyai keinginan untuk mendapatkan kompensasi yang terbaik sehingga dapat menyebabkan *agent* tidak sesuai dalam mengambil keputusan yang tepat untuk kepentingan *principal*, apalagi jika *agent* merupakan pihak oportunitis (Jensen dan meckling, 1976).

Teori keagenan dilandasi oleh beberapa asumsi dimana asumsi-asumsi tersebut dibedakan menjadi tiga jenis, yaitu asumsi tentang sifat manusia, asumsi keorganisasian dan asumsi

informasi. Asumsi sifat manusia menekankan bahwa manusia memiliki sifat mementingkan diri sendiri (*self-interest*), manusia memiliki daya pikir terbatas mengenai persepsi masa mendatang (*bounded rationality*), dan manusia selalu menghindari resiko (*risk averse*). Asumsi keorganisasian adalah adanya konflik antara anggota organisasi, efisiensi sebagai kriteria efektifitas dan adanya asimetri informasi antara *principal* dan *agent*. Asumsi informasi adalah bahwa informasi sebagai barang komoditi yang dapat diperjualbelikan. Berdasarkan asumsi sifat dasar manusia dijelaskan bahwa masing-masing individu semata-mata termotivasi oleh kepentingan dirinya sendiri sehingga menimbulkan konflik kepentingan antar *principal* dan *agen*. Pihak pemilik (*principal*) termotivasi mengadakan kontrak untuk mensejahterakan dirinya dengan profitabilitas yang selalu meningkat. Sedangkan manager (*agent*) termotivasi untuk memaksimalkan pemenuhan ekonomi dan psikologisnya, antara lain dalam hal memperoleh investasi, pinjaman, maupun kontrak kompensasi (Eisenhardt, 1989).

Dengan demikian terdapat dua kepentingan yang berbeda di dalam perusahaan dimana masing-masing pihak berusaha untuk mencapai atau mempertahankan tingkat kemakmuran yang dikehendaki. Permasalahan yang timbul akibat adanya perbedaan kepentingan antara *principal* dan *agent* disebut dengan *agency problems*. Salah satu dampak *agency problems* adalah adanya *asymmetric information*. *Asymmetric information* adalah adanya ketidaksinambungan informasi yang dimiliki *principal* dan *agent*, ketika *principal* tidak memiliki informasi yang cukup tentang kinerja dan *agen* sebaliknya, *agent* memiliki lebih banyak informasi mengenai kapasitas diri, lingkungan kerja dan perusahaan secara keseluruhan (Widyaningdyah, 2001). Arrow (dalam Purwati, 2006) juga menjelaskan bahwa ada dua macam *agency problems* yaitu:

1. *Moral hazard*, adalah suatu keadaan saat pemegang saham sebagai *principal* tidak dapat melakukan pengamatan secara detail apakah manajemen sebagai *agent* sudah membuat keputusan secara tepat, dan sesuai dengan aturan yang berlaku.
2. *Adverse selection*, adalah suatu keadaan saat seorang *agent* membuat pengamatan yang belum dilakukan oleh *principal* dimana hasil pengamatan tersebut dipakai untuk mengambil keputusan. *Principal* dalam hal ini sulit memastikan apakah informasi hasil pengamatan *agent* telah dipakai dengan baik untuk membuat keputusan yang baik sesuai kepentingan *principal*.

Jadi, teori agensi digunakan untuk membantu komite audit untuk memahami konflik kepentingan yang dapat muncul antara pemilik dan manajemen. Pemilik selaku investor bekerjasama dan menandatangani kontrak kerja dengan manajemen perusahaan untuk menginvestasikan dana mereka.

2.1.2 Agency Cost

Agency cost muncul ketika salah satu pihak (*principal*) memberikan hak kepada pihak lain (*agent*) untuk bertindak atas nama pemilik. *Agency cost* dapat terlihat pada *value loss to shareholders* dan perbedaan kepentingan antara *shareholders* dan *corporate managers*. *agency cost* juga dapat diartikan sebagai penjumlahan dari *monitoring cost*, *bonding cost* dan *residual loss*.

1. Monitoring Cost

Monitoring Cost adalah biaya yang dikeluarkan oleh *principals* untuk mengukur, mengamati, dan mengontrol perilaku manajer. Dalam hal ini, termasuk biaya audit, rencana kompensasi eksekutif dan biaya untuk memberhentikan menejer. Awalnya *agency cost* dibayar oleh *principals*, namun Fama dan Jensen (1983) menyatakan bahwa pada akhirnya *agent*-lah yang

akan memikulnya karena kompensasi yang mereka terima sudah disesuaikan dengan biaya monitoring tersebut.

2. *Bonding Cost*

Bonding Cost adalah biaya pengikatan *agent* agar *agent* bertindak yang terbaik untuk kepentingan pemilik perusahaan. Para *agent* akan diberi kompensasi yang wajar dan bila mereka tidak bertindak sesuai dengan keinginan pemilik, kompensasi tersebut tidak akan diberikan.

3. *Residual Loss*

Meskipun sudah ada *monitoring* dan *bonding*, kadang kepentingan *shareholders* dan *agent* masih sulit diselaraskan karena itu muncul *agency losses* dari perbedaan kepentingan tersebut dan ini disebut *residual loss*. *Residual loss* menunjukkan *tradeoff* antara membatasi manajer dan memaksakan mekanisme kontrak yang didesain untuk mengurangi *agency problems*. Secara umum tidak ada perusahaan yang tidak memiliki biaya keagenan kecuali bagi perusahaan yang dimiliki dan dikelola sepenuhnya oleh seorang manajer (Jensen dan Meckling, 1976).

2.1.3 Komite Audit

Pada tanggal 24 september 2004 Bapepam No. Kep-29/PM/2004 menerbitkan peraturan mengenai pembentukan dan pedoman pelaksanaan kerja komite audit, yang berisi tentang kriteria tertentu mengenai ketua komite audit beserta anggotanya, peran, dan tanggung jawabnya yang menjadikan kinerja komite audit lebih terarah dan jelas

Kep.Direksi BEJ No. Kep-315/BEJ/06/2000 menyatakan komite audit adalah komite yang dibentuk oleh dewan komisaris perusahaan, yang anggotanya diangkat dan diberhentikan oleh dewan komisaris, dan berfungsi sebagai pengawas kinerja direksi dalam mengelola perusahaan. Di Indonesia melihat betapa pentingnya keberadaan komite audit yang efektif dalam

rangka meningkatkan kualitas pengelolaan perusahaan, maka serangkaian ketentuan mengenai komite audit telah diterbitkan, antara lain sebagai berikut:

- a. Pedoman *Good Corporate Governance* (Maret, 2001) yang menganjurkan semua perusahaan di Indonesia memiliki komite audit.
- b. Surat edaran Bapepam No. SE-03/PM/2000 yang merekomendasikan perusahaan-perusahaan publik memiliki Komite Audit, sebagaimana diperbaharui dengan keputusan ketua Bapepam No. Kep-41/PM/2003 tanggal 22 Desember 2003 tentang Peraturan Nomor IX.1.5: Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit.
- c. Kep. 339/BEJ/07-2001, yang mengharuskan semua perusahaan yang *listed* di Bursa Efek Jakarta memiliki komite audit.
- d. Keputusan Menteri BUMN No. Kep-103/MBU/2002 yang mengharuskan semua BUMN mempunyai komite audit.
- e. Keputusan Menteri BUMN No. Kep-117/M-MBU/2002 yang mengharuskan semua BUMN mempunyai komite audit.

Tujuan utama pembentukan komite audit yaitu membantu dewan komisaris melakukan pengawasan atas kinerja perusahaan, berikut Peraturan Bapepam-LK No/IX/1/5 mengenai tugas dan tanggungjawab komite audit antara lain:

1. Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang dikeluarkan perusahaan.
2. Melakukan penelaahan atas ketaatan perusahaan atas peraturan perundang-undangan di pasar modal dan peraturan perundang-undangan lainnya.
3. Melakukan penelaahan atas pelaksanaan pemeriksaan oleh auditor eksternal.
4. Melaporkan kepada komisaris berbagai risiko yang dihadapi perusahaan dan pelaksanaan manajemen risiko oleh direksi.

5. Melakukan penelaahan dan melaporkan kepada komisaris atas pengaduan yang berkaitan dengan emiten.
6. Menjaga kerahasiaan data, dokumen, dan informasi perusahaan.

2.1.4 Struktur Komite Audit

Setiap Negara mempunyai struktur komite audit yang berbeda sesuai dengan kebijakan dan kondisinya, di Indonesia struktur komite audit disusun dalam Kep. Men. 117/2002 untuk perusahaan BUMN dan untuk perusahaan publik diatur dalam Keputusan BEJ dan Peraturan Bapepam yang terkait. Ketentuan mengenai struktur komite audit menurut keputusan ketua Bapepam No. Kep-41/PM/2003 tanggal 22 Desember 2003 tentang Peraturan Nomor IX.1.5 tentang pembentukan dan pedoman pelaksanaan kerja komite audit adalah sebagai berikut:

1. Anggota komite audit diangkat dan diberhentikan oleh dewan komisaris dan dilaporkan kepada rapat umum pemegang saham.
2. Anggota komite audit yang merupakan komisaris independen bertindak sebagai ketua komite audit. Dalam hal ini komisaris independen yang menjadi anggota komite audit lebih dari satu orang maka salah satunya bertindak sebagai ketua komite audit.

Adapun persyaratan keanggotaan komite audit sesuai keputusan ketua Bapepam No. Kep-41/PM/2003 tanggal 22 Desember 2003 tentang Peraturan Nomor IX.1.5: Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit adalah sebagai berikut:

1. Memiliki integritas yang tinggi, kemampuan, pengetahuan dan pengalaman yang memadai sesuai dengan latar belakang pendidikannya, serta mampu berkomunikasi dengan baik.

2. Salah seorang dari anggota komite audit memiliki latar belakang pendidikan akuntansi atau keuangan.
3. Memiliki pengetahuan yang cukup untuk membaca dan memahami laporan keuangan.
4. Memiliki pengetahuan yang memadai tentang peraturan perundangan di bidang pasar modal dan peraturan perundang-undangan terkait lainnya.
5. Bukan merupakan orang dalam kantor akuntan publik yang memberikan jasa audit dan atau non audit pada emiten atau perusahaan publik yang bersangkutan dalam 1 (satu) tahun terakhir sebelum diangkat oleh komisaris sebagaimana dimaksudkan dalam peraturan Nomor VIII A.2 tentang independensi akuntan yang memberikan jasa audit di pasar modal.
6. Bukan merupakan karyawan kunci emiten atau perusahaan publik dalam 1 (satu) tahun terakhir sebelum diangkat oleh komisaris.
7. Tidak mempunyai saham baik langsung maupun tidak langsung pada emiten atau perusahaan publik. Dalam hal anggota komite audit memperoleh saham akibat suatu peristiwa hukum maka dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan setelah diperolehnya saham tersebut wajib mengalihkan kepada pihak lain.
8. Tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan emiten atau perusahaan publik, komisaris, direksi atau pemegang saham utama emiten atau perusahaan publik.
9. Tidak memiliki hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha emiten atau perusahaan publik.

2.1.5 Efektivitas Komite Audit

Untuk meningkatkan kualitas perusahaan, tingkat efektivitas komite audit harus diperhatikan karena semakin tinggi tingkat efektivitas komite audit maka semakin baik pula peran komite dalam menjalankan fungsi pengawasannya. Komite audit pada umumnya harus dievaluasi kinerjanya secara berkala, yang dilaksanakan oleh akuntan publik independen yang bukan berasal dari akuntan internal perusahaan (Ataina, 2000). Pendangan ini sejalan dengan sommer (dalam Ataina, 2000) yang menekankan bahwa auditor mempunyai fungsi yang penting dalam mengevaluasi kinerja komite audit, Hal ini disebabkan karena auditor merupakan pihak yang sering berhubungan dengan berbagai komite audit di suatu perusahaan. Selain itu, akuntan publik juga menerapkan sistem *peer review* (evaluasi kinerja suatu Kantor Akuntan Publik (KAP) oleh KAP lain) dalam melakukan evaluasi kinerja sehingga hasil evaluasi lebih bersifat kredibel. Komite audit juga harus mereview hasil evaluasi tersebut dan melaporkan temuannya kepada dewan komisaris. Kinerja komite audit dapat dilihat dari frekuensi pertemuan audit, ukuran anggota komite audit yang melakukan tugasnya serta kemampuan setiap anggota dalam melakukan segala hal yang berkaitan dengan keuangan. Sehingga jika semua sesuai ketentuan, maka diharapkan efektifitas komite audit akan tercapai.

Efektifitas Komite Audit dapat dinilai dari kinerja komite audit dimana komite audit secara periodik harus mengevaluasi kinerjanya. Evaluasi komite audit sebaiknya dilakukan oleh akuntan publik yang independen yang bukan akuntan publik perusahaan (Ataina, 2000). Posisi ini tepat untuk auditor dikarenakan auditor mempunyai pengalaman dan wawasan yang memadai mengenai komite audit, dan pada akuntan publik terdapat sistem *peer review* yaitu evaluasi kinerja antar sesama kap sehingga diharapkan dapat memberikan hasil yang tepat dan dapat

dipercaya, disamping itu komite audit harus menyampaikan hasil temuannya kepada dewan komisaris.

2.1.5.1 Komponen Index Efektivitas Komite Audit

Dalam penelitian ini Efektivitas komite dilihat berdasarkan seperangkat index efektivitas komite audit yang dikembangkan oleh DeZoort, et al (2002) yang memberikan penjelasan mengenai komite audit secara empiris adalah *“An effective audit committee has qualified members with the authority and resources to protect stakeholder interests by ensuring reliable financial reporting, internal controls, and risk management through diligent oversight efforts.”*

Berdasarkan dari penjelasan tersebut dapat diketahui bahwa tujuan utama pembentukan komite audit yaitu melindungi kepentingan pemegang saham minoritas melalui penunjukan anggotanya yang mempunyai kompetensi dengan segala kewenangan dan sumber daya untuk memberikan pengawasan yang rutin dan terarah.

Atas dasar pengertian tersebut terdapat empat kriteria dalam mengukur efektivitas komite audit dimana setiap kriteria tersebut dijadikan dasar untuk mengukur tingkat efektivitas komite audit, kriteria tersebut yaitu :

1. Susunan Komite Audit (*Composition*)

Susunan komite audit mengacu pada komposisi yang memungkinkan komite audit untuk melakukan evaluasi yang tepat untuk kepentingan pemegang saham. Contohnya : independensi, kapabilitas, latar belakang pendidikan, pengalaman, dll.

2. Kewenangan Komite Audit (*Authority*)

Kewenangan mengacu pada tanggung jawab sejak diberikannya suatu tanggung jawab yang disertai dengan kewenangan dalam melakukan suatu tindakan yang terkait. Contohnya : piagam komite audit, laporan pertanggungjawabab komite audit.

3. Sumber daya Komite Audit (*Resource*)

sumber daya mengacu pada jumlah komite audit yang efektif agar dapat melaksanakan tugasnya dengan optimal. Contohnya jumlah anggota komie audit.

4. Kerajinan Komite Audit (*Diligence*)

Kerajinan mengacu pada tingkat kesediaan anggota komite audit dalam berkerja sama untuk melakukan tugasnya seperti memberikan pertanyaan, mengejar jawaban ketika berhadapan dengan manajer, auditor internal, auditor eksternal, dan pihak lain yang berhubungan. Contohnya pertemuan komite audit.

2.1.5.1 Keahlian Komite Audit

Bapepam (2004) menyatakan bahwa anggota yang mempunyai setidaknya satu ahli keuangan dapat meningkatkan efektivitas komite audit dalam melakukan tugas pengawasan. *The Sarbanes Oxley Act* juga menjelaskan pengertian terkait ahli akuntansi atau keuangan dalam komite audit namun tidak memberikan kriteria yang pasti mengenai orang yang dapat disebut sebagai "*financial expert*". UU ini hanya meminta SEC merumuskan kriteria "*financial expert*" dengan menekankan beberapa hal berikut :

1. Pengalaman sebelumnya sebagai akuntan publik atau auditor, CFO, *controller*, *chief accounting officer*, atau posisi yang sejenis.
2. Pemahaman terhadap standar akuntansi keuangan dan laporan keuangan.

3. Pengalaman dalam audit atas laporan keuangan perusahaan.
4. Pengalaman dalam pengendalian internal.
5. Pemahaman atas akuntansi untuk penaksiran (*estimates*), *accruals*, dan cadangan (*reserves*).

Dari pengertian diatas maka perusahaan minimal harus mempunyai satu ahli keuangan dimana memiliki pengetahuan dan kompetensi dibidang akuntansi, keuangan, dan pengauditan sehingga dapat mengidentifikasi dan memberikan pertanyaan yang relavan kepada manajemen dan auditor eksternal agar dapat menjamin kualitas pelaporan keuangan termasuk ketepatan waktu pelaporan keuangan perusahaan.

2.1.5.2 Piagam Komite Audit

Piagam komite audit penting sebagai standar untuk membantu anggota anggota komite audit untuk konsentrasi pada pertanggung jawaban yang spesifik dan mempermudah *stakeholder* dalam mengevaluasi kualitas kinerja komite audit (DeZoort, et al 2002), disamping itu Bedard, et al (2004) menyatakan bahwa piagam yang resmi tidak hanya sebagai pedoman untuk melaksanakan tugasnya, tapi juga sebagai sumber kewenangan komite audit.

Bapepam (2004) menyebutkan seluruh perusahaan yang terdaftar harus mengadopsi piagam untuk komite audit dan menyebutkan empat tugas utama komite audit yaitu :

1. mengawasi atas laporan keuangan,
2. audit external
3. sistem pengendalian internal
4. kepatuhan pada peraturan pasar modal.

Bapepam (2004) menyebutkan seluruh perusahaan yang terdaftar harus mengadopsi piagam untuk komite audit. Komite audit mempunyai peran untuk mereview kepatuhan perusahaan baik secara hukum dan peraturan oleh karena itu komite audit memerlukan suatu acuan yang jelas dan kuat mengenai tugasnya agar kinerja komite audit dapat berjalan dengan baik yaitu berupa piagam komite audit.

2.5.1.3 Ukuran Komite Audit

Komite audit harus memiliki anggota yang memadai untuk melaksanakan tugasnya agar efektif (DeZoort, et al 2002). Di Indonesia, pedoman pembentukan komite audit yang efektif menjelaskan bahwa anggota komite audit yang dimiliki oleh perusahaan sedikitnya terdiri dari 3 orang, diketuai oleh komisaris independen perusahaan dengan dua orang eksternal yang independen terhadap perusahaan, serta menguasai dan memiliki latar belakang akuntansi dan keuangan (KNKG, 2002). Selain itu komite ribbon blue (BRC, 1999) dan Sarbanes-Oxley Act (2002), Bapepam (2004) menyatakan bahwa bahwa komite audit setidaknya terdiri dari tiga orang.

2.5.1.4 Pertemuan Komite Audit

keahlian, independensi, kewenangan, dan sumber daya, tidak akan meningkatkan efektivitas kecuali komite audit dapat mempunyai peran yang aktif (Ika dan Ghazali, 2012). Bapepam (2004) tidak menyatakan seberapa sering komite audit harus bertemu, namun IDX (2004) menetapkan bahwa komite audit harus mengisi laporan atas aktivitas pada BOC secara periodik minimal sekali dalam tiga bulan.

Jadi dapat dikatakan bahwa setidaknya komite audit harus melaksanakan minimal empat kali pertemuan, Oleh karena itu untuk menilai efektivitasnya, penelitian sekarang menggunakan persyaratan pertemuan atas audit minimal 4 kali setahun

2.1.6 Laporan Keuangan

Menurut Kieso, etal (2010) mendefinisikan laporan keuangan sebagai berikut:

“Laporan keuangan merupakan sarana utama dimana informasi keuangan dikomunikasikan dengan pihak luar perusahaan, laporan ini memberikan sejarah kuantitatif perusahaan dalam satuan uang”. Laporan keuangan yang lengkap menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No.1 terdiri dari komponen neraca, laporan laba/rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Laporan keuangan harus menerapkan PSAK secara benar disertai pengungkapan yang diharuskan PSAK dalam catatan atas laporan keuangan. Informasi lain tetap disajikan untuk menghasilkan penyajian yang wajar walaupun pengungkapan tersebut tidak diharuskan oleh standar akuntansi (PSAK No.1, par.10).

Laporan keuangan merupakan media komunikasi yang digunakan manajemen kepada pihak luar perusahaan. Kualitas komunikasi yang dicapai tergantung pada kualitas laporan keuangan. Karakteristik kualitas laporan keuangan sebagaimana yang dinyatakan dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (IAI, 2009) No.1 adalah:

1. Dapat dipahami

Kualitas penting informasi yang ditampung dalam laporan keuangan adalah kemudahannya untuk dapat dipahami oleh pemakai. Pemakai diasumsikan memiliki pengetahuan

yang memadai tentang aktivitas ekonomi dan bisnis, akuntansi, serta kemauan untuk mempelajari informasi.

2. Relevan

Agar bermanfaat, informasi harus relevan untuk memenuhi kebutuhan pemakai dalam proses pengambilan keputusan. Informasi memiliki kualitas relevan jika dapat mempengaruhi keputusan ekonomi pemakai. Informasi yang relevan dapat digunakan untuk membantu mengevaluasi peristiwa masa lalu, masa kini, atau masa depan.

3. Andal

Informasi memiliki kualitas andal jika bebas dari pengertian yang menyesatkan, kesalahan material, dan dapat diandalkan pemakainya sebagai penyajian yang jujur (*faithfull representation*) dari yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar diharapkan dapat disajikan.

4. Dapat dibandingkan

Pemakai harus dapat membandingkan laporan keuangan antar periode untuk mengidentifikasi kecenderungan (*trend*) posisi dan kinerja keuangan. Pemakai juga harus dapat membandingkan laporan keuangan antar perusahaan. Hal tersebut dilakukan untuk mengevaluasi posisi keuangan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan secara relatif. Dalam rangka memberikan informasi yang lebih cepat dan akurat kepada investor mengenai kondisi keuangan emiten atau perusahaan publik serta dalam rangka mengikuti perkembangan pasar modal global, pada tanggal 5 Juli 2011 Bapepam mengeluarkan Peraturan Bapepam Nomor X.K.2, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam Nomor: Kep/346/BL/2011 Tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Keuangan Berkala, laporan keuangan harus disertai dengan laporan akuntan dengan pendapat yang lazim dan disampaikan kepada Bapepam selambat-lambatnya pada akhir bulan

ketiga (90 hari) setelah tanggal laporan keuangan tahunan. Dalam Peraturan Bapepam No. X.K.2, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam Nomor: Kep/346/BL/2011 disebutkan laporan keuangan yang harus disampaikan kepada Bapepam terdiri dari:

1. Laporan posisi keuangan (neraca),
2. Laporan laba rugi komprehensif,
3. Laporan perubahan ekuitas,
4. Laporan arus kas,
5. Laporan posisi keuangan pada awal periode komparatif, jika Emiten atau

Perusahaan Publik menerapkan suatu kebijakan akuntansi secara retrospektif, membuat penyajian kembali pos-pos laporan keuangan, atau mereklasifikasi pospos dalam laporan keuangannya; dan

6. Catatan atas laporan keuangan.

2.1.7 Pengertian *Good Corporate Governance* (GCG)

Good Corporate Governance merupakan suatu proses dan struktur yang digunakan oleh organisasi perusahaan untuk meningkatkan keberhasilan usaha dan akuntabilitas perusahaan. Secara prinsip, *Good Corporate Governance* menyangkut kepentingan para pemegang saham, perlakuan yang sama terhadap para pemegang saham, peranan semua pihak yang berkepentingan (*stakeholders*) dalam *Good Corporate Governance*, transparansi dan penjelasan serta peranan Dewan Komisaris dan Komite Audit. Secara umum, *Good Corporate Governance* dapat didefinisikan sebagai suatu proses dan struktur yang digunakan oleh perusahaan (pemegang saham/pemilik modal, Komisaris/Dewan Pengawas dan Direksi) untuk meningkatkan keberhasilan usaha dan akuntabilitas perusahaan guna mewujudkan nilai pemegang saham dalam

jangka panjang dengan tetap memperhatikan kepentingan *stakeholders* lainnya, berlandaskan peraturan perundang-undangan dan nilai-nilai etika. *Good Corporate Governance* dapat pula diartikan sebagai mekanisme pengelolaan perusahaan untuk memastikan bahwa tindakan manajemen akan selalu diarahkan pada peningkatan nilai perusahaan (Rachmawati, 2008). Secara umum, prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* terdiri dari :

- a. *Fairness* (Keadilan), menjamin perlindungan hak-hak pemegang saham, serta menjamin terlaksananya komitmen dengan para investor.
- b. *Transparency* (Transparansi), mewajibkan adanya suatu informasi yang terbuka, tepat waktu, serta jelas dan dapat diperbandingkan yang menyangkut keadaan keuangan, pengelolaan perusahaan dan kepemilikan perusahaan.
- c. *Accountability* (Akuntabilitas), menjelaskan peran dan tanggungjawab serta mendukung usaha menjamin penyeimbangan kepentingan manajemen dan pemegang saham, sebagaimana yang diawasi oleh Dewan Komisaris.
- d. *Responsibility* (Pertanggungjawaban), memastikan dipatuhinya peraturan-peraturan serta ketentuan yang berlaku sebagai cermin dipatuhinya nilai-nilai sosial.

Melalui SE-03/PM/2000, Bapepam mensyaratkan pembentukan Komite Audit di perusahaan publik Indonesia yang terdiri dari sedikitnya tiga orang diketuai oleh komisaris independen perusahaan dengan dua orang eksternal yang independen terhadap perusahaan serta menguasai dan memiliki latar belakang akuntansi dan keuangan. Sementara itu bagi perusahaan BUMN/BUMD, keberadaan Komite Audit telah diatur secara tegas yaitu dalam Kep. Men. 117/2002 yang menyatakan bahwa :

“Komisaris/ Dewan Pengawas harus membentuk Komite Audit yang bekerja secara kolektif dan berfungsi membantu Komisaris/Dewan Pengawas dalam melaksanakan tugasnya, yaitu

membantu Komisaris/Dewan Pengawas dalam memastikan efektivitas sistem pengendalian intern, efektivitas pelaksanaan tugas auditor eksternal dan auditor internal.”

Sehubungan dengan pengimplementasian *Good Corporate Governance*, keberadaan Komite Audit terutama di BUMN diharapkan dapat menjadi institusi yang efektif dan memberikan nilai tambah bagi penerapan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* terutama dalam hal *transparency* dan *accountability*. Hendaknya keberadaan Komite Audit tidak sekedar kepatuhan, namun benar-benar dapat membangun peran Komite Audit yang efektif dalam perusahaan.

2.1.8 Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam)

Pasar Modal di Indonesia didirikan pada tahun 1976. Menurut Kepres No.52/1976, Bapepam bertugas:

- Mengadakan penilaian terhadap perusahaan-perusahaan yang akan menjual saham-sahamnya melalui Pasar Modal apakah telah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan dan sehat
- Menyelenggarakan Bursa Pasar Modal yang efektif dan efisien;
- Terus menerus mengikuti perkembangan perusahaan-perusahaan yang menjual saham-sahamnya melalui pasar modal.

Keluarnya Kepres 53 tentang Pasar Modal dan SK Menkeu No.1548 tahun 1990 menghapus fungsi Bapepam sebagai penyelenggara pasar modal, sehingga lembaga ini dapat memfokuskan diri pada pengawasan pembinaan pasar modal. Posisinya Bapepam dalam struktur pasar modal Indonesia yaitu berada di bawah Menteri Keuangan Republik Indonesia dan bertanggungjawab melakukan pembinaan, pengaturan dan pengawasan pasar modal. Dalam

melaksanakan fungsinya, Bapepam mempunyai kewenangan untuk memberikan ijin, persetujuan dan pendaftaran kepada para pelaku pasar modal, memproses pendaftaran dalam rangka penawaran umum, menerbitkan peraturan pelaksanaan dari perundang-undangan dan melakukan penegakkan hukum atas setiap pelanggaran terhadap peraturan erundang-undangan. Terkait dengan pelaporan keuangan perusahaan, kewenangan Bapepam sebagaimana tercantum dalam pasal 5 UU pasar Modal meliputi:

- Menetapkan persyaratan dan tata cara pernyataan pendaftaran serta menyatakan, menunda atau mebatalkan efektifnya pernyataan pendaftaran;
- Mengadakan pemeriksaan dan penyelidikan terhadap setiap pihak dalam halterjadi peristiwa yang diduga merupakan pelanggaran terhadap perundang-undangan atau peraturan pelaksanaanya;
- Mewajibkan setiap pihak untuk:
 1. menghentikan atau memperbaiki iklan atau promosi yang berhubungan dengan kejadian di pasar modal
 2. mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk mengatasi akibat yang timbul dari iklan atau promosi dimaksud;
- Melakukan pemeriksaan atau menunjuk pihak lain untuk melakuka pemeriksaan terhadap:
 1. setiap emiten atau perusahaan publik yang telah atau diwajibkan menyampaikan pernyataan pendaftaran kepada Bapepam;
 2. pihak yang dipersyaratkan memiliki ijin usaha, ijin orang perorangan, persetujuan atau pendaftaran profesi berdasarkan Undang-undang.
- Mengumumkan hasil pemeriksaan;

- Membekukan atau mebatalkan pencatatan suatu efek pada Bursa Efek atau menghentikan transaksi bursa atas efek tertentu untuk jangka waktu tertentu guna melindungi kepentingan pemodal;
- Menghentikan kegiatan perdagangan Bursa efek untuk jangka waktu tertentu dalam hal keadaan darurat;
- Memeriksa keberatan yang diajukan oleh pihak yang dikenakan sanksi oleh Bursa Efek, lembaga Kliring dan Penjaminan atau Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian serta memberikan keputusan membatalkan atau menguatkan pengenaan sanksi dimaksud;
- Melakukan tindakan yang diperlukan untuk mencegah kerugian masyarakat sebagai akibat pelanggaran atas ketentuan di bidang Pasar Modal;
- Berdasarkan UU Pasar Modal tahun 1995 pasal 105, Bapepam mengenakan sanksi administrative atas pelanggaran Undang-undang ini dan atau peraturan pelaksanaannya yang dilakukan oleh setiap pihak yang memperoleh ijin persetujuan atau pendaftaran dari Bapepam berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. denda yaitu kewajiban untuk membayar sejumlah uang tertentu;
 - c. pembatasan kegiatan usaha;
 - d. pembekuan kegiatan usaha;
 - e. pencabutan ijin usaha;
 - f. pembatalan persetujuan ; dan
 - g. pembatalan pendaftaran

2.1.9 Ketepatan Waktu Pelaporan

Informasi tidak dapat dikatakan relevan jika tidak tepat waktu. Informasi harus tersedia untuk pengambilan keputusan sebelum informasi tersebut kehilangan kesempatan untuk mempengaruhi keputusan. Ketepatan waktu tidak menjamin relevansi, tetapi relevansi informasi tidak dimungkinkan tanpa ketepatan waktu informasi mengenai kondisi dan posisi perusahaan harus secara cepat dan tepat waktu sampai ke pemakai laporan keuangan. Menurut Hendriksen (1992) ketepatan waktu mengimplikasikan bahwa laporan keuangan seharusnya disajikan pada suatu interval waktu, untuk menjelaskan perubahan dalam perusahaan yang mungkin mempengaruhi pemakai informasi dalam membuat prediksi dan keputusan. Setiap perusahaan yang *listing* di BEI wajib melakukan pelaporan ke bursa sebagaimana yang ditentukan oleh peraturan BEI. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No.45 Tahun 1995 tentang penyelenggaraan kegiatan di bidang pasar modal, bab XII Sanksi administrative pasal 61, dinyatakan bahwa yang melakukan pelanggaran atas ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dikenakan sanksi administratif berupa:

- peringatan tertulis
- denda yaitu kewajiban untuk membayar sejumlah uang tertentu
- pembatasan kegiatan usaha
- pembekuan kegiatan usaha
- pencabutan izin usaha
- pembatalan persetujuan
- pembatalan pendaftaran

Sanksi sebagaimana dimaksud dalam poin nomor dua dan seterusnya di atas dapat dikenakan dengan atau tanpa didahului pengenaan sanksi peringatan tertulis. Sanksi denda dapat

dikenakan secara tersendiri atau bersama-sama dengan pengenaan sanksi lainnya. Jenis dan besarnya sanksi ditetapkan oleh Bapepam selaku pengawas Pasar Modal. Terkait dengan keterlambatan penyampaian laporan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bapepam, dikenakan sanksi administratif sebagai berikut:

- a. Emiten yang Pernyataan Pendaftaran telah menjadi efektif, dikenakan sanksi denda Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) atas setiap hari keterlambatan penyampaian laporan dimaksud dengan ketentuan bahwa jumlah keseluruhan denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- b. Perusahaan Publik yang terlambat menyampaikan Pernyataan Pendaftarannya, dikenakan sanksi denda Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) atas setiap hari keterlambatan penyampaian laporan dimaksud dengan ketentuan bahwa jumlah keseluruhan denda paling banyak Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- c. Direktur atau komisaris Emiten atau Perusahaan Publik, atau setiap pihak yang memiliki sekurang-kurangnya 5% (lima perseratus) saham Emiten atau Perusahaan Publik, dikenakan sanksi denda Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) atas setiap hari keterlambatan penyampaian laporan dimaksud dengan ketentuan bahwa jumlah keseluruhan denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah). Ketaatan emiten terhadap peraturan BEJ selalu dipantau oleh Bapepam dan secara periodik mempublikasikan hasil pemeriksaannya. Dalam UU No.8 tahun 1995 menyatakan bahwa perusahaan publik wajib menyampaikan laporan keuangan tahunan yang telah diaudit oleh akuntan yang terdaftar di Bapepam selambat-lambatnya 120 hari terhitung sejak tanggal berakhirnya tahun buku. Untuk laporan keuangan tengah tahunan :

1. Selambat-lambatnya 60 hari setelah tengah tahun buku berakhir, jika tidak disertai laporan akuntan,
2. Selambat-lambatnya 90 hari tanggal setelah tengah tahun buku berakhir, jika disertai laporan akuntan dalam rangka penelaahan terbatas,
3. Selambat-lambatnya 120 hari tanggal setelah tengah tahun buku perusahaan berakhir, jika disertai laporan akuntan yang memberikan pendapat tentang kewajaran laporan keuangan.

Sedangkan untuk laporan keuangan triwulanan selambat-lambatnya 60 hari setelah triwulan buku perusahaan berakhir.

Chamber dan Penman (1984) mendefinisikan ketepatan waktu kedalam dua cara: pertama, ketepatan waktu didefinisikan sebagai keterlambatan waktu pelaporan dari tanggal laporan keuangan sampai tanggal melaporkan. Kedua, ketepatan waktu ditentukan dengan ketepatan waktu pelaporan realatif atas tanggal pelaporan yang diharapkan. Untuk melihat ketepatan waktu, biasanya suatu penelitian melihat keterlambatan pelaporan (*lag*).

Dyer dan McHugh (1975) dalam penelitiannya menggunakan tiga kriteria keterlambatan:

1. *preliminary lag*, yaitu interval jumlah hari antara tanggal laporan keuangan sampai penerimaan laporan akhir *preliminary* oleh bursa;
2. *Auditor's report lag*, yaitu jumlah hari antara laporan keuangan sampai tanggal laporan auditor ditandatangani;
3. *Total lag*, adalah interval jumlah hari antara tanggal laporan keuangan sampai tanggal penerimaan laporan dipublikasikan oleh bursa. Penelitian Soo dan Schwartz (1996) mengukur keterlambatan pelaporan berdasarkan pada kepatuhan perusahaan terhadap peraturan pelaporan informasi keuangan yang ditetapkan oleh SEC.

2.1.10 *Financial Distress*

Beberapa ahli ekonomi memiliki pengertian yang berbeda mengenai *financial distress*.

Berikut para ahli ekonomi yang mengemukakan pendapatnya:

Menurut altman (1968), financial distress digolongkan ke dalam empat istilah kategori, yaitu

a. *Economic Failure*

Yaitu keadaan dimana perusahaan mempunyai pendapatan lebih rendah terhadap biaya total yang termasuk biaya modal namun perusahaan masih dapat tetap beroperasi sepanjang kreditur bersedia memberikan tambahan pinjaman dan pemilik bersedia mendapatkan pengembalian (return) dibawah tingkat bunga pasar.

b. *Business Failure*

Yaitu keadaan dimana perusahaan berhenti beroperasi karena ketidakmampuan perusahaan untuk menghasilkan laba untuk membiayai pengeluaran, walaupun perusahaan mengalami keuntungan namun apabila tidak bisa menutupi pengeluaran yang terkait maka kondisi ini akan menyebabkan kesulitan keuangan.

c. *Insolvency*

1) *Technical insolvency*

keadaan dimana perusahaan tidak mampu memenuhi kewajibannya yang jatuh tempo karena ketidakcukupan arus kas.

2) *Insolvency in Bankruptcy Sense*

keadaan dimana total kewajiban lebih besar dari nilai pasar total aset perusahaan.

Maka memiliki ekuitas yang negatif.

d. *Legal Bankruptcy* Keadaan dimana perusahaan sudah dinyatakan bangkrut secara hukum

Harnanto (1984) menyatakan secara garis besar faktor penyebab dari *financial distress* dibagi menjadi 3, yaitu:

1. Sistem Perekonomian

Roda perekonomian lebih dikendalikan oleh persaingan bebas, maka dunia usaha dibagi menjadi dua kategori, yaitu perusahaan tradisional dan perusahaan dengan memanfaatkan teknologi. Kemampuan bersaing ini merupakan faktor penyebab *financial distress*. Oleh karena itu, efisiensi manajemen sangat berperan dan merupakan alat pengendalian yang tangguh terhadap perusahaan pesaing.

2. Faktor Eksternal Perusahaan

Kesulitan perusahaan terkadang berada diluar perusahaan yang bukan merupakan jangkauan manajemen perusahaan. Faktor tersebut antara lain:

- a) Persaingan bisnis yang ketat,
- b) Berkurangnya permintaan terhadap produk atau jasa yang dihasilkan,
- c) Turunnya harga jual terus-menerus,
- d) Kecelakaan atau bencana alam yang menimpa perusahaan.

3. Faktor Internal Perusahaan

Faktor ini dapat dicegah melalui tindakan perusahaan itu sendiri. Faktor internal ini biasanya merupakan hasil keputusan dan kebijaksanaan yang tidak tepat di masa lalu serta kegagalan manajemen untuk melakukan sesuatu pada saat yang diperlukan. Faktor-faktor tersebut antara lain:

- a) Terlalu besarnya jumlah kredit yang diberikan kepada debitur atau pelanggan
- b) Manajemen yang tidak efisien
- c) Penyalahgunaan wewenang dan kecurangan

Indikator yang harus diperhatikan manajemen perusahaan yang berhubungan dengan efektivitas dan efisiensi operasinya, seperti yang dikemukakan oleh Harnanto (1984) yaitu:

1. Penurunan volume penjualan karena adanya perubahan selera atau permintaan konsumen
2. Kenaikan biaya produksi
3. Tingkat persaingan yang semakin ketat
4. Kegagalan melakukan ekspansi
5. Ketidakefektifan dalam melaksanakan fungsi pengumpulan piutang
6. Kurang adanya dukungan atau fasilitas perbankan (kredit)
7. Tingginya tingkat ketergantungan terhadap piutang.

Adapula indikator yang harus diperhatikan pihak eksternal, antara lain:

1. Penurunan deviden yang dibagikan kepada para pemegang saham
2. Terjadinya penurunan laba yang terus-menerus, bahkan sampai terjadinya kerugian
3. Ditutup atau dijualnya satu atau lebih unit usaha
4. Terjadinya pemecatan pegawai
5. Pengunduran diri eksekutif puncak
6. Harga saham yang terus menerus turun di pasar modal

2.2 Penelitian Terdahulu

Farber (2004) melakukan penelitian mengenai hubungan antara *fraud firm* dengan kualitas *corporate governance*. Menemukan bahwa perusahaan yang dinyatakan *fraud* oleh SEC cenderung meningkatkan kualitas dewan direktur dan struktur komite audit, dimana menemukan bahwa ahli keuangan komite audit, pertemuan komite audit mempunyai hubungan negatif

dengan *financial reporting fraud*, dan juga terdapat perbedaan ukuran komite audit antara *fraud firm* dan *non fraud firm*.

Purwati (2006) melakukan penelitian dengan menggunakan sampel 140 perusahaan *go public* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Hasil penelitian menyatakan bahwa Independensi anggota komite audit, Ketua komite audit, keahlian keuangan anggota komite audit berpengaruh signifikan terhadap Ketepatan waktu pelaporan keuangan, sedangkan Keanggotaan komite audit, Proporsi komisaris independen tidak berpengaruh terhadap Ketepatan waktu pelaporan keuangan.

Nor, dkk (2010) meneliti tentang hubungan *corporate governance* terhadap *audit report lag* dengan menggunakan sampel 628 perusahaan non keuangan yang terdaftar di Bursa Malaysia pada tahun 2002. Menemukan bahwa *audit committee size* dan *audit committee meeting* berpengaruh negatif terhadap *audit report lag*, sedangkan *audit committee independence* dan *audit committee expertise* tidak berpengaruh terhadap *audit report lag*.

Ika dan Ghazali (2012) meneliti tentang efektivitas komite audit yang berdasarkan dari index DeZoort terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan dengan menggunakan sampel 211 perusahaan non keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2008. Penelitian ini menemukan bahwa efektivitas komite dapat meningkatkan ketepatan waktu pelaporan keuangan. Pambayun (2012) meneliti tentang pengaruh karakteristik komite audit terhadap *financial distress* dengan menggunakan *proxy* laba bersih negatif 2 tahun untuk menentukan perusahaan yang mengalami *financial distress*, dan menunjukan bahwa alat ukur ini dapat berfungsi sebagai penanda untuk mengetahui perusahaan yang mengalami *financial distress* dimana dalam penelitian ini digunakan sebagai alat ukur perusahaan yang mengalami *financial distress*.

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian Ika dan Ghazali (2012) yang menguji pengaruh dari efektivitas komite audit terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan pada perusahaan non keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2008. Dan juga menggunakan variabel-variabel independen efektivitas komite audit berdasarkan index DeZoort yaitu *composition*, *authority*, *resources*, dan *diligence*. Terdapat beberapa Perbedaan pada penelitian ini dengan penelitian Ika dan Ghazali (2012), yaitu jangka waktu penelitian yang sebelumnya dilakukan hanya 1 tahun, sedangkan pada penelitian sekarang sampel diambil dari 3 tahun berturut-turut. Perbedaan selanjutnya yaitu pada penelitian terdahulu dimana menguji efektivitas komite audit dalam kaitannya terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan pada perusahaan yang normal, sedangkan dalam penelitian ini menguji hubungan tersebut pada perusahaan yang terindikasi kesulitan keuangan (*financial distress*), disamping itu menguji elemen index DeZoort secara individu yaitu keahlian komite audit, piagam komite audit, ukuran komite audit, dan pertemuan komite audit. Penelitian ini juga menambahkan 5 variabel yaitu ROA, *leverage*, ukuran perusahaan, ukuran KAP, dan jenis industri sebagai variabel kontrol.

Tabel 2.1
Ringkasan Penelitian Terdahulu

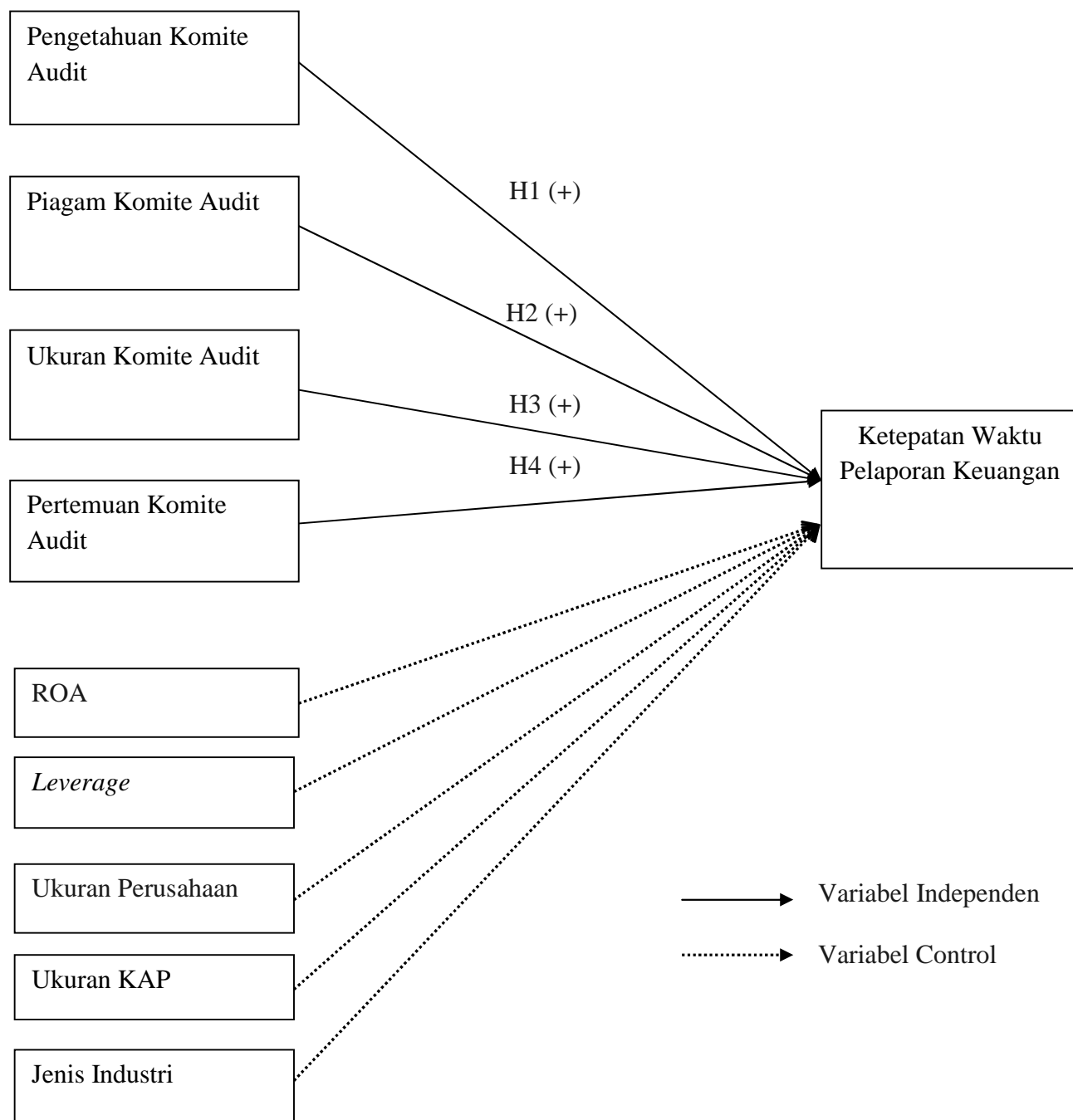
No	Peneliti	Variabel	Analisa Statistik	Hasil Penelitian
1	Farber (2005)	<p>Ukuran direktur luar (x)</p> <p>Pertemuan komite audit (x)</p> <p>Ahli keuangan komite audit (x)</p> <p>Ukuran komite audit (x)</p> <p>Kualitas KAP (x)</p> <p>Proporsi CEO/COB (x)</p>	Analisis Regresi Berganda	menemukan bahwa ahli keuangan komite audit, pertemuan komite audit mempunyai hubungan negatif dengan <i>financial reporting fraud</i> , terdapat perbedaan ukuran komite audit antara <i>fraud</i> dan <i>non fraud firm</i>
2	Purwati (2006)	<p>Keanggotaan komite audit (x)</p> <p>Independensi anggota komite audit (x)</p> <p>Proporsi komisaris independen (x)</p> <p>Ketua komite audit (x)</p> <p>Kompetensi komite audit (x)</p> <p>Ketepatan waktu pelaporan keuangan (y)</p>	Analisis Regresi Logistik	Menemukan bahwa independensi komite audit, ketua komite audit, dan kompetensi komite audit berpengaruh secara signifikan terhadap Ketepatan waktu pelaporan keuangan, sedangkan Keanggotaan komite audit dan proporsi komisaris independen tidak berpengaruh secara signifikan terhadap Ketepatan waktu pelaporan keuangan

3	Nor, dkk (2010)	<p>Ukuran komite audit (x)</p> <p>Independensi komite audit (x)</p> <p>Pertemuan komite audit (x)</p> <p>Ahli keuangan komite audit (x)</p> <p>Ukuran dewan (x)</p> <p>Independensi dewan (x)</p> <p>Dualitas CEO (x)</p> <p><i>Audit report lag</i> (y)</p>	Analisis Regresi Berganda	Menemukan bahwa ukuran komite audit, pertemuan komite audit berpengaruh negatif terhadap audit report lag, sedangkan independensi komite audit dan keahlian komite audit tidak berpengaruh terhadap <i>audit report lag</i>
4	Ika dan Ghazali (2012)	<p>Efektivitas komite audit (x)</p> <p>Kondisi keuangan (c)</p> <p>Ukuran perusahaan (c)</p> <p>Ukuran KAP (c)</p> <p>Tipe industri (c)</p> <p>Ketepatan waktu pelaporan keuangan (y)</p>	Cross-sectional regression with ordinary least squares (OLS)	Menemukan bahwa efektivitas komite audit, ukuran perusahaan, dan tipe industri berpengaruh positif secara signifikan terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan, sedangkan ukuran perusahaan dan ukuran KAP tidak berpengaruh secara signifikan

Sumber: Data diolah, 2013

Gambar 2.1

Model Kerangka Pemikiran Teoritis



2.4 Pengembangan Hipotesis

2.4.1 Keahlian Audit dan Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan Perusahaan yang Terindikasi Kesulitan Keuangan

Kriteria susunan komite audit dapat dilihat dari anggota komite audit yang mempunyai keahlian, pengetahuan keuangan memberikan dasar yang baik bagi anggota komite audit untuk memeriksa dan menganalisis informasi keuangan. Latar belakang pendidikan merupakan syarat yang penting penting untuk memastikan efektivitas komite audit (Ika dan Ghazali, 2012). Anggota komite audit yang menguasai keuangan akan lebih profesional dan cepat beradaptasi terhadap perubahan dan inovasi (Hambrick dan Mason, 1984 dalam Rahmat et al, 2008).

Abbot, et al (2004) dan Farber (2005) menemukan bahwa ahli keuangan pada komite audit mempunyai hubungan negatif dengan *financial reporting fraud*, selain itu mempunyai minimal satu ahli keuangan pada komite audit yang mempunyai kompetensi akuntansi dan keuangan dapat mengurangi *income decreasing earning management* (Bedart, et al 2004) dan meningkatkan ketepatan waktu pelaporan keuangan (Purwati, 2006). Namun Nor, dkk (2010) menemukan bahwa keahlian komite audit tidak berpengaruh secara signifikan terhadap *audit report lag*.

Dengan demikian adanya minimal satu orang ahli keuangan sebagai anggota komite audit diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelaporan keuangan, khususnya ketepatan waktu pelaporan keuangan. Jadi berdasarkan penjelasan tersebut, dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H1 : Keahlian komite audit berpengaruh positif terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan yang terindikasi kesulitan keuangan.

2.4.2 Piagam Komite Audit dan Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan Perusahaan yang Terindikasi Kesulitan Keuangan

Piagam komite audit berfungsi sebagai standar untuk membantu anggota anggota komite audit berfokus pada pertanggung jawaban yang spesifik dan mempermudah pemegang saham (*stakeholder*) dalam mengevaluasi kualitas kinerja komite audit. Namun belum ada atau masih sedikit penelitian yang mengaitkan kewenangan dengan efektivitas komite audit (DeZoort, et al 2002). Selain itu Ika dan Ghazali (2012) juga menambahkan bahwa sedikit penelitian yang mengaitkan piagam komite audit dan kebanyakan lebih menekankan pada area pengungkapan (*disclosure*), sebagai contoh yaitu Carcello, et al (2002) menguji piagam komite audit dan laporan komite audit untuk menilai apakah tugas yang diberikan dalam piagam komite audit sesungguhnya ditampilkan dan dijelaskan dalam laporan komite audit.

Namun terdapat penelitian terdahulu yang mengaitkan antara komite audit dengan kualitas pelaporan keuangan. Bedard, et al (2004) menemukan bahwa kehadiran atas mandat yang jelas menentukan pertanggung-jawaban atas komite audit mengurangi kemungkinan manajemen laba agresif.

Dengan demikian piagam komite audit memberikan dasar dan otoritas yang kuat bagi komite audit dalam menjalankan perannya yang diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelaporan keuangan khususnya pada ketepatan waktu pelaporan keuangan. Jadi berdasarkan penjelasan tersebut, dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H2 : Piagam komite audit berpengaruh positif terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan yang terindikasi kesulitan keuangan.

2.4.3 Ukuran Komite Audit dan Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan Perusahaan yang Terindikasi Kesulitan Keuangan

Untuk menciptakan komite audit yang efektif, maka komite harus memiliki anggota yang cukup atau memadai dalam mengadakan pertemuan dan bertukar pendapat dengan yang lain, agar dapat menjalankan tugasnya dengan baik (DeZoort, et al 2002). Hal ini dikarenakan setiap anggota komite audit memiliki pengalaman dan pengetahuan terkait keuangan dan tata kelola perusahaan yang bervariasi.

Terdapat temuan yang bervariasi dalam kaitannya ukuran komite audit terhadap kualitas pelaporan keuangan, Farber (2005) menemukan bahwa perbedaan ukuran komite audit antara *fraud dan non fraud firm* tidak signifikan secara statistik. Purwati (2006) menemukan bahwa ukuran komite audit tidak mempunyai asosiasi yang signifikan dengan ketepatan waktu pelaporan keuangan, dan juga terhadap manajemen laba (xie, et al 2003 ; Bedard, et al 2004), namun ditemukan signifikan dalam menjelaskan kemungkinan atas manajemen laba triwulan (Yang dan Krishan, 2005), *earning restatement* (lin, et al 2006), *qualified audit opinion in annual report* (Pucheta dan Fuentes, 2007), dan *audit report lag* (Nor, dkk 2010).

Dengan demikian ukuran komite audit yang memadai disimpulkan secara umum dapat menghindari terjadinya masalah masalah keuangan sehingga diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelaporan keuangan khususnya dalam pencapaian ketepatan waktu laporan keuangan. Jadi berdasarkan penjelasan tersebut, dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H3 : Ukuran komite audit berpengaruh positif terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan yang terindikasi kesulitan keuangan.

2.4.4 Pertemuan Komite Audit dan Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan Perusahaan yang Terindikasi Kesulitan Keuangan

Pertemuan atau rapat komite audit berfungsi sebagai media untuk melaksanakan berbagai perbaikan atau evaluasi yang dibutuhkan, yang termasuk memastikan kualitas laporan keuangan. Frekuensi dan isi pertemuan komite audit dipengaruhi oleh berbagai hal salah satunya yaitu tugas, tanggung jawab, dan ukuran perusahaan. Berdasarkan keputusan ketua Bapepam Nomor Kep-24/PM/2004 dalam peraturan Nomor IX.I.5 disebutkan bahwa komite audit mengadakan rapat sekurang-kurangnya sama dengan ketentuan minimal rapat dewan komisaris yang ditetapkan dalam anggaran dasar perusahaan.

Beberapa penelitian sudah menguji hubungan antara pertemuan komite audit dan kualitas pelaporan keuangan, yaitu Collier dan Gregory (1999) menyebutkan bahwa frekuensi pertemuan komite audit yang lebih sering memberikan mekanisme pengawasan dan pemantauan kegiatan keuangan yang lebih efektif, meliputi persiapan dan pelaporan informasi keuangan perusahaan. Farber (2005) menemukan bahwa *fraud firm* mempunyai pertemuan komite audit yang kurang dari *non fraud firm* pada tahun *preceding fraud* dinyatakan, namun dalam tiga tahun ke depan, perusahaan *fraud* melaksanakan pertemuan komite audit lebih sering dari perusahaan tanpa *fraud*.

Perusahaan dengan pertemuan komite audit setidaknya kurang dari empat kali setahun cenderung memberikan pernyataan kembali laporan keuangan (Abbott, et al 2004), disamping itu Nor, dkk (2010) menemukan bahwa pertemuan komite audit berpengaruh secara signifikan terhadap *audit report lag*. Namun Lin, et al (2006) menemukan bahwa pertemuan komite audit mempunyai hubungan yang tidak signifikan dengan *earnings restatement*.

Dari penjelasan diatas, pertemuan komite audit secara umum disimpulkan dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan melalui fungsi pegawasannya dan pemberian sarannya yang khususnya diharapkan dapat meningkatkan ketepatan waktu pelaporan keuangan. Maka berdasarkan penjelasan tersebut, dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H4 : Pertemuan komite audit berpengaruh positif terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan yang terindikasi kesulitan keuangan.

BAB III

METODE PENELITIAN

Dalam bab ini akan dijelaskan tentang bagaimana penelitian akan dilaksanakan secara operasional. Oleh karena itu, pada bagian ini akan diuraikan hal-hal seperti variabel penelitian dan definisi operasional variabel, populasi dan sampel penelitian, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, serta metode analisis.

3.1 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional

pada penelitian ini menggunakan variabel-variabel yang terdiri dari variabel terikat (*dependent variable*), variabel bebas (*independent variabel*) dan variabel kontrol (*control variable*). Variabel terikat dalam penelitian ini adalah ketepatan waktu pelaporan keuangan, variabel bebas dalam penelitian ini adalah keahlian komite audit, piagam komite audit, ukuran komite audit, dan pertemuan komite audit, sedangkan variabel kontrol dalam penelitian ini adalah ROI, *leverage*, ukuran perusahaan, tipe audit, dan tipe industri.

3.1.1 Definisi Operasional Variabel

Pada bagian ini akan dijelaskan definisi operasional variabel yang terdiri dari variabel, dimensi, indikator dan skala pengukuran. Berikut ini adalah tabel yang menjelaskan definisi operasional variabel.

Tabel 3.1
Definisi Operasional Variabel

Variabel	Dimensi	Indikator	Skala
Ketepatan waktu pelaporan keuangan (y)	Arsip Otoritas Jasa Keuangan (OJK)	Variabel dummy, 0 (nol) untuk kategori perusahaan tidak tepat waktu dalam menyampaikan laporan keuangan dan 1 (satu) untuk kategori perusahaan tepat waktu dalam menyampaikan laporan keuangan	Skala Nominal
Keahlian komite audit (x)	Susunan komite audit (<i>composition</i>)	Proporsi anggota komite audit yang mempunyai kompetensi di bidang keuangan terhadap total anggota komite audit	Skala Rasio
Piagam komite audit (x)	Kewenangan komite audit (<i>authority</i>)	Jumlah pernyataan mengenai tugas dan tanggungjawab komite audit	Skala Interval
Ukuran komite Audit (x)	Ukuran komite audit (Resource)	Jumlah anggota Komite Audit dalam perusahaan	Skala Interval

Pertemuan komite audit (x)	Keaktifan komite audit (diligence)	Jumlah rapat komite audit dalam 1 tahun	Skala Interval
ROA	Laporan laba rugi komprehensif	$\frac{\text{Total Laba}}{\text{Total Aset}}$	Skala Rasio
<i>Leverage</i>	Laporan posisi keuangan	$\frac{\text{Total Kewajiban}}{\text{Total Aset}}$	Skala Rasio
Size	Laporan posisi keuangan	Total Aset	Skala Interval
Ukuran KAP	Laporan tahunan perusahaan	Variabel dummy, 0 (nol) kategori perusahaan mitra KAP Non Big 4 dan 1 (satu) kategori perusahaan mitra KAP Big 4	Skala Nominal
Jenis industri	Laporan tahunan perusahaan	Variabel dummy, 0 (nol) kategori perusahaan non manufaktur dan 1 (satu) kategori perusahaan manufaktur	Skala Nominal

Sumber: Data diolah, 2013

3.1.1 Variabel Dependen

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah ketepatan waktu pelaporan keuangan yaitu tanggal penyampaian pelaporan keuangan perusahaan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dimana bapepam menetapkan bahwa perusahaan wajib menyampaikan laporan keuangan tahunan yang telah diaudit selambat-lambatnya 90 hari setelah tahun buku berakhir. Ketepatan waktu pelaporan keuangan dalam penelitian ini diukur menggunakan variabel dummy. Perusahaan dikategorikan tepat waktu jika laporan keuangan disampaikan sebelum tanggal 1

April, sedangkan perusahaan dikategorikan tidak tepat waktu jika perusahaan menyampaikan laporan keuangan setelah tanggal 1 April, kategori 1 (nol) untuk perusahaan yang tepat waktu dan kategori 1 (satu) untuk perusahaan yang tidak tepat waktu.

3.1.2 Variabel Independen

Variabel independen merupakan variabel bebas yang menjelaskan atau mempengaruhi variabel dependen. Variabel independen dalam penelitian ini adalah keahlian komite audit, piagam komite audit, ukuran komite audit, dan pertemuan komite audit.

3.1.2.1 Keahlian Komite Audit

Keputusan Bapepam Nomor Kep-29/PM/2004 yang menyebutkan bahwa minimal salah seorang dari anggota komite audit adalah seseorang yang memiliki latar belakang pendidikan akuntansi atau keuangan. Keahlian komite audit dalam penelitian ini diukur dari proporsi jumlah anggota komite audit yang ahli dalam bidang keuangan dengan total jumlah anggota komite audit.

3.1.2.2 Piagam Komite Audit

Bapepam (2004) menyebutkan bahwa seluruh perusahaan yang terdaftar harus mengadopsi piagam komite audit untuk komite audit. Disamping itu DeZoort, et al (2002) menyatakan bahwa kewenangan merupakan aspek yang penting dalam menjamin kualitas kinerja komite audit, karena dapat dijadikan sebagai acuan komite audit untuk menjalankan tugasnya dan mempermudah komisaris untuk menilai tingkat pertanggung jawaban atas kinerja komite

audit. Piagam komite audit dalam penelitian ini diukur dari jumlah piagam komite audit yang dicantumkan dalam laporan keuangan tahunan perusahaan (*annual report*).

3.1.2.3 Ukuran komite audit

Ukuran komite audit yaitu jumlah keanggotaan komite audit dalam suatu perusahaan. Berdasarkan Surat Edaran Bapepam No. SE-03/PM/2000 komite audit pada perusahaan yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia terdiri dari sedikitnya tiga orang anggota dan diketuai oleh komisaris independen perusahaan dengan dua orang eksternal yang independen. Dimana BRC (1999), Sarbanes-Oxley Act (2002), dan Bapepam (2004) menyebutkan bahwa komite audit setidaknya terdiri dari tiga orang. Ukuran komite audit dalam penelitian ini diukur dari jumlah komite audit yang dibentuk perusahaan.

3.1.2.4 Pertemuan komite audit

Pertemuan komite audit yaitu rapat atau pertemuan yang dilakukan oleh komite audit dalam waktu satu tahun, pedoman FCGI (2002) menyatakan bahwa komite audit harus mengadakan pertemuan paling sedikit setiap tiga bulan atau minimal empat kali pertemuan dalam satu tahun. Pertemuan komite audit dalam penelitian ini diukur dari jumlah pertemuan atau rapat yang dilaksanakan oleh komite audit dalam satu tahun.

3.1.3 Variabel Kontrol

Penelitian ini menggunakan lima variabel kontrol untuk mengendalikan faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi terjadinya kondisi ketepatan waktu pelaporan keuangan. Variabel kontrol yang digunakan adalah ROA, *leverage*, ukuran perusahaan, tipe KAP, dan jenis industri.

3.1.3.1 ROA

ROA (*Return on Asset*) adalah perbandingan antara tingkat laba dengan total asset yang dimiliki perusahaan dalam satu periode akuntansi. Semakin besar nilai ROA diharapkan perusahaan semakin efisien dan efektif dalam melakukan aktivitas operasinya. Nilai ROA pada penelitian ini diukur dari laba akhir perusahaan dibagi oleh total asset perusahaan.

3.1.3.2 Leverage

Leverage yaitu kemampuan perusahaan dalam membayar kewajibannya ke berbagai pihak, perbandingan antara total hutang dengan total aset perusahaan dalam satu periode akuntansi. Nilai *Leverage* pada penelitian ini diukur dari proporsi total utang dengan total asset perusahaan.

3.1.3.3 Ukuran Perusahaan

Ukuran perusahaan (*Size*) yaitu nilai perusahaan yang dapat diukur menurut berbagai cara dimana dalam penelitian ini didasarkan kepada *total asset* perusahaan. Semakin besar total aset yang dimiliki diharapkan semakin mempunyai kemampuan dalam melunasi kewajiban di masa depan, sehingga perusahaan dapat menghindari permasalahan keuangan (Storey 1994 dalam Fachrudin, 2008). Setelah memperoleh hasil total aset yang *valid* maka langkah selanjutnya adalah transformasi data mentah menjadi data nilai logaritma natural dari data itu sendiri (\ln total aset).

3.1.3.4 Ukuran KAP

Ukuran kantor akuntan publik (KAP) adalah besar kecilnya kantor akuntan publik yang dilihat dari berbagai sisi. Penentuan ukuran KAP dalam penelitian ini diukur dengan cara mengelompokkan perusahaan yang diaudit oleh KAP *big four* dan *non big four*.

3.1.3.5 Jenis Industri

Jenis industri adalah penggolongan suatu perusahaan berdasarkan jenis usaha yang dilakukannya. Penentuan jenis industri pada penelitian ini diukur dengan cara mengelompokkan perusahaan yang masuk dalam kategori manufaktur dan perusahaan masuk dalam kategori non manufaktur.

3.2 Populasi dan Sampel

Populasi yang digunakan pada penelitian ini adalah perusahaan non keuangan yang mengalami indikasi kesulitan keuangan (*financial distress*) di Bursa Efek Indonesia dari tahun 2010-2012. Penelitian ini mendefinisikan kesulitan keuangan mengacu pada penelitian yang dilakukan oleh Elloumi dan Gueyie (2001) yaitu mengkategorikan perusahaan yang terindikasi kesulitan keuangan bila selama dua tahun berturut-turut mengalami laba bersih negatif.

Sampel merupakan bagian dari populasi yang dapat mewakili karakteristiknya (Ghozali, 2005). Sampel yang digunakan yaitu sampel yang diambil dari perusahaan yang terindikasi kesulitan keuangan. Penentuan sampel ini dengan menggunakan *random sampling*, yaitu sampel yang memiliki kesesuaian karakteristik sampel dengan kriteria pemilihan sampel yang telah ditentukan. Kriteria tersebut adalah:

- a. Perusahaan publik yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dari tahun 2010-2012.

- b. Perusahaan publik non keuangan yang mengalami 2 tahun berturut-turut laba negatif.
- c. Perusahaan publik yang memiliki data laporan komite audit yang lengkap.

3.3 Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan data sekunder. Data sekunder yang digunakan terdiri dari:

1. Data keuangan untuk mengetahui perusahaan yang mengalami laba negatif 2 tahun berturut-turut dan yaitu laporan keuangan auditan perusahaan tahun 2010-2012.
2. Data untuk melihat karakteristik komite audit (ukuran komite audit, frekuensi pertemuan komite audit, dan kompetensi komite audit) dan variabel control yaitu dari laporan tahunan perusahaan (*annual report*) 2010-2012 dan ICMD.
3. Data mengenai tanggal penyampaian laporan keuangan perusahaan diperoleh dari arsip Instansi Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

3.4 Metode Pengumpulan Data

Metode yang digunakan dalam pengumpulan data penelitian ini dengan data dokumentasi. Dokumentasi adalah penelitian arsip yang memuat kejadian masa lalu (Ghozali, 2005). Pengumpulan data dokumentasi dilakukan dengan kategori dan klasifikasi data-data tertulis yang berhubungan dengan masalah penelitian, baik dari sumber dokumen, buku, dan sebagainya.

3.5 Metode Analisis Data

Penelitian ini akan menganalisis pengaruh variabel independen terhadap ketepatan waktu perusahaan yang mengalami kesulitan keuangan.

3.5.1 Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif digunakan untuk menggambarkan atau mendeskripsikan variabel-variabel dalam penelitian. Statistik deskriptif yang digunakan adalah nilai rata-rata (*mean*), standard deviasi, maksimum, dan minimum untuk menggambarkan setiap variabel penelitian.

3.5.2 Regresi Logistik

Untuk menguji seluruh hipotesis dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan regresi logistik (*regression logistic*) yang variabel bebasnya merupakan kombinasi antara variabel kontinyu (data metrik) dan kategorial (data non metrik). Campuran skala pada variabel bebas tersebut menyebabkan asumsi *multivariate normal distribution* tidak dapat terpenuhi, dengan demikian bentuk fungsinya menjadi logistik. Teknik analisis ini tidak memerlukan uji normalitas dan uji asumsi klasik pada variabel bebasnya (Ghozali, 2005).

Model logit digunakan untuk melihat hubungan kemungkinan perusahaan akan mengalami kondisi kesulitan keuangan pada suatu periode dengan karakteristik komite audit pada periode yang sama. Variabel terikat yang digunakan merupakan variabel *binary*, yaitu apakah perusahaan tersebut menyampaikan laporan keuangannya dengan tepat waktu atau tidak. Variabel bebas yang digunakan dalam model ini adalah keahlian komite audit, piagam komite audit, ukuran komite audit, pertemuan komite audit. Perhitungan statistik dan pengujian hipotesis dengan analisis regresi logistik dalam penelitian ini dilakukan dengan bantuan program komputer SPSS.

Persamaan yang dibentuk dengan menggunakan regresi logistik adalah sebagai berikut:

Model persamaan regresi diperoleh sebagai berikut :

$$\ln \frac{TL}{1 - TL} = \beta_0 + \beta_1 ACEXP + \beta_2 ACCHART + \beta_3 ACMEET + \beta_4 MEET + \beta_5 ROA + \beta_6 LEV + \beta_7 SIZE + \beta_8 KAP + \beta_9 SIZE \cdot IND + \epsilon_i$$

Keterangan :

TIMELINESS = Nilai 1 (satu) untuk perusahaan yang tepat waktu dalam menyampaikan laporan keuangan dan nilai 0 (nol) untuk perusahaan yang tidak tepat waktu dalam menyampaikan laporan keuangan.

ACEEXP = Proporsi anggota komite audit yang mempunyai keahlian keuangan terhadap total anggota komite audit.

ACCHART = Jumlah pernyataan dari piagam komite audit.

ACSIZE = Jumlah seluruh anggota komite audit dalam perusahaan.

ACMEET = Jumlah pertemuan komite audit selama satu tahun.

ROA = Proporsi jumlah laba terhadap aset.

LEV = Proporsi jumlah hutang terhadap aset.

SIZE = Ukuran perusahaan = Ln total aset.

KAP = Ukuran kantor akuntan publik yaitu nilai 1 (satu) untuk perusahaan yang di audit oleh KAP *big four* dan nilai 0 (nol) untuk perusahaan yang diaudit non *big four*.

IND = Jenis industri yaitu nilai 1 (satu) untuk perusahaan manufaktur dan nilai 0 (nol) untuk perusahaan non manufaktur.

1. Uji Kelayakan Model (Goodness of Fit Test)

Menurut Ghozali (2005), *goodness of fit test* dapat dilakukan dengan memperhatikan output dari *Hosmer and Lemeshow's Goodness of fit test*, dengan hipotesis:

H₀ : Model yang dihipotesiskan fit dengan data

H_A : Model yang dihipotesiskan tidak fit dengan data

Jika nilai statistik *Hosmer and Lemeshow* sama dengan atau kurang dari 0,05 maka hipotesis nol ditolak, yang berarti terdapat perbedaan signifikan antara model dengan nilai observasinya. Sehingga uji kelayakan model tidak baik karena model tidak dapat memprediksi nilai observasinya. Jika nilai statistik *Hosmer and Lemeshow* lebih besar dari 0,05 maka hipotesis nol tidak dapat ditolak dan berarti model mampu memprediksi nilai observasinya.

2. Uji Kelayakan Keseluruhan Model (*Overall Fit Model Test*)

Dalam menilai *overall* fit model, dapat dilakukan dengan beberapa cara. Diantaranya:

a. Chi Square (χ^2)

Tes statistik Chi Square (χ^2) digunakan berdasarkan pada fungsi *likelihood* pada estimasi model regresi. *Likelihood* (L) dari model adalah probabilitas bahwa model yang dihipotesiskan menggambarkan data input. L ditransformasikan menjadi $-2\log L$ untuk menguji hipotesis nol dan alternatif. Penggunaan nilai χ^2 untuk keseluruhan model terhadap data dilakukan dengan membandingkan nilai $-2 \log \text{likelihood}$ awal (hasil *block number* 0) dengan nilai $-2 \log \text{likelihood}$ hasil *block number* 1. Dengan kata lain, nilai *chi square* didapat dari nilai $-2\log L_1 - 2\log L_0$. Apabila terjadi penurunan, maka model tersebut menunjukkan model regresi yang baik.

b. *Cox and Snell's R Square* dan *Nagelkerke's R square*

Cox dan Snell's R Square merupakan ukuran yang mencoba meniru ukuran *R square* pada *multiple regression* yang didasarkan pada teknik estimasi *likelihood* dengan nilai maksimum kurang dari 1 sehingga sulit diinterpretasikan. Untuk mendapatkan koefisien determinasi yang dapat diinterpretasikan seperti nilai R^2 pada *multiple regression*, maka digunakan *Nagelkerke R square* merupakan modifikasi dari koefisien *Cox and Snell R square* untuk memastikan bahwa nilainya bervariasi dari 0 sampai 1. Hal ini dilakukan dengan cara membagi nilai *Cox and Snell R square* dengan nilai maksimumnya. Nilai *Nagelkerke R square* menilai variabilitas variabel dependen dapat dijelaskan dengan variabilitas variabel independen (Ghozali, 2005).

c. Tabel Klasifikasi 2x2

Tabel klasifikasi 2x2 menghitung nilai estimasi yang benar (*correct*) dan salah (*incorrect*). Pada kolom merupakan dua nilai prediksi dari variabel dependen dalam hal ini perusahaan tepat waktu dalam penyampaian laporan keuangan (1) dan perusahaan tidak tepat waktu dalam penyampaian laporan keuangan (0), sedangkan pada baris menunjukkan menunjukkan nilai observasi sesungguhnya dari variabel dependen. Pada model sempurna, maka semua kasus akan berada pada diagonal dengan ketepatan peramalan 100% (Ghozali, 2005).

3. Pengujian Signifikansi Koefisien Regresi

Pengujian koefisien regresi dilakukan untuk menguji seberapa jauh semua variabel independen dan variabel kontrol yang dimasukkan dalam model, mempunyai pengaruh terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan yang terindikasi kesulitan keuangan. Koefisien regresi logistik dapat ditentukan dengan menggunakan *p-value* (*probability value*).

- a. Tingkat signifikansi () yang digunakan sebesar 5% (0,05).
- b. Kriteria penerimaan dan penolakan hipotesis didasarkan pada signifikansi *p-value*.
Jika *p-value*(signifikan) > , maka hipotesis alternatif ditolak. Sebaliknya jika *p-value* < , maka hipotesis alternatif diterima.